



PEMERINTAH
KABUPATEN BADUNG

SURVEI PENYUSUNAN INDEKS PEMBANGUNAN GENDER

KABUPATEN BADUNG TAHUN 2024



**BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2024**



**SURVEI PENYUSUNAN INDEKS PEMBANGUNAN
GENDER KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2024**

**BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN BADUNG
2024**

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu,

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa, Dokumen **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN DENGAN SUB KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK BERUPA “SURVEI PENYUSUNAN INDEKS PEMBANGUNAN GENDER KABUPATEN BADUNG TAHUN 2024”** dapat diselesaikan dengan baik.

Survei ini dilaksanakan berdasarkan kerjasama antara Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Badung dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Pendidikan Nasional Denpasar dengan tujuan untuk mengetahui Tingkat Pencapaian Pembangunan berbasis Gender di Kabupaten Badung, mengidentifikasi kondisi kesenjangan gender antara laki – laki dengan perempuan, menganalisis indikator komposit dan indikator tunggal yang mewakili pembangunan gender, serta mengungkap faktor – faktor signifikansi yang mempengaruhi perubahan indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Badung Tahun 2024.

Kami menghaturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan survei ini dan kami menyadari sepenuhnya bahwa kegiatan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu masukan dan saran kami terima dalam upaya menyempurnakan hasil Penyusunan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Badung Tahun 2024 ini.

Om Shanti, Shanti, Shanti Om

Mangupura, September 2024



EXECUTIVE SUMMARY

Penelitian ini mengkaji pencapaian pembangunan berbasis gender di Kabupaten Badung, Bali, dengan menggunakan Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2023 sebagai indikator utama. Kesetaraan gender dianggap sebagai elemen krusial dalam mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, mengingat peran perempuan yang setara dengan laki-laki dalam ekonomi, pendidikan, dan sektor sosial lainnya. Namun, ketidaksetaraan gender masih menjadi tantangan di Indonesia, termasuk di Kabupaten Badung, terutama dalam partisipasi perempuan di sektor formal, akses terhadap pendidikan, dan kesejahteraan ekonomi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menghitung tingkat pencapaian pembangunan manusia berbasis gender yang direpresentasikan oleh Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2023, mengidentifikasi kondisi kesenjangan gender antara laki-laki dan perempuan, menganalisis indikator komposit dan indikator tunggal yang mewakili pembangunan gender, serta mengungkap faktor-faktor signifikan yang mempengaruhi perubahan IPG di Kabupaten Badung. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan memadukan data primer yang diperoleh melalui observasi langsung dan data sekunder dari survei resmi lembaga pemerintah. Tiga dimensi utama yang diukur dalam IPG adalah umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa IPM laki-laki di Kabupaten Badung mencapai 85,42, sedangkan IPM perempuan 81,92, dengan nilai IPG sebesar 95,94. Nilai ini mendekati kesetaraan sempurna, mengindikasikan bahwa kesenjangan gender semakin menyempit. Namun, di balik capaian ini, terdapat perbedaan signifikan antara laki-laki dan perempuan dalam beberapa aspek, termasuk pengeluaran per kapita yang menunjukkan laki-laki lebih unggul dibanding perempuan (Rp 20.352 vs Rp 17.596). Indikator pendidikan juga menunjukkan ketimpangan, meskipun ada peningkatan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) bagi perempuan.

Analisis regresi time series mengungkapkan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap perubahan IPG, dengan nilai signifikansi 0,024. Setiap peningkatan 1% dalam TPAK dapat meningkatkan IPG sebesar 0,5 unit, menunjukkan pentingnya meningkatkan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja untuk memperbaiki kesetaraan gender. Sebaliknya, partisipasi sekolah di tingkat SD, SMP, dan SMA tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap IPG, yang menandakan bahwa meskipun ada peningkatan akses pendidikan, faktor ini belum cukup kuat untuk mengubah kesetaraan gender secara signifikan.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan peningkatan akses pendidikan bagi perempuan, melalui beasiswa dan pendidikan vokasional. Selain itu, pemerintah diimbau untuk memperkuat program-program kesehatan seperti Garbasari yang fokus pada gizi dan kesehatan ibu dan anak untuk meningkatkan Angka Harapan Hidup (AHH) perempuan. Di sektor ekonomi, penting untuk mendorong kebijakan kesetaraan upah dan mendukung Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang dikelola perempuan. Pemantauan kebijakan dan evaluasi berkala juga diperlukan untuk memastikan kebijakan yang responsif gender dapat mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Badung.

Dengan demikian, meskipun Kabupaten Badung telah mencapai kemajuan signifikan dalam pembangunan gender, diperlukan langkah-langkah strategis yang lebih intensif untuk mengatasi ketimpangan yang masih ada, terutama dalam hal ekonomi dan pendidikan. Kesetaraan gender yang lebih baik akan berkontribusi langsung terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah.

Kata Kunci : Indeks Pembangunan Gender, Kesetaraan Gender, Kabupaten Badung.

Daftar Isi

	Halaman
Halaman Sampul	i
Halaman Judul.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Executif Summary.....	iv
Daftar Isi	v-vi
Daftar Gambar.....	vii
Daftar Tabel	viii
 BAB 1 Pendahuluan	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sasaran	8
1.5 Ruang Lingkup	8
1.6 Dasar Hukum	8
 BAB 2 Tinjauan Pustaka	 10
2.1 Konsep Gender	10
2.2 Bentuk Ketidakadilan Gender	13
2.3 Kesetaraan Gender	18
2.4 Perspektif Gender dalam Pelestarian Nilai Sosial Budaya	20
 BAB 3 Metodologi Penelitian	 24
3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan	24
3.2 Metode Pengumpulan Data	24
3.3 Teknik Analisis data.....	26
 BAB 4 Pembahasan	 32
4.1 Tingkat Pencapaian Pembangunan Manusia Berbasis Gender yang direpresentasikan oleh Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2023 ...	32
4.2 Kondisi Kesenjangan Pembangunan Manusia antara Laki-laki dan Perempuan di Kabupaten Badung	38
A. Berdasarkan Angka Harapan Hidup saat Mahir.....	38
B. Berdasarkan Harapan Lama Sekolah (HLS).....	41
C. Berdasarkan Rata-rata Lama Sekolah.....	44
D. Berdasarkan Pengeluaran Perkapita	48
4.3 Indikator Komposit dan Indikator Tunggal yang Merepresentasikan Pembangunan Gender di Kabupaten Badung	58

4.3.1	Dimensi Umur Panjang dan Hidup Senat (Angka Harapan Hidup)	58
4.3.2	Dimensi Pengetahuan	59
4.3.3	Dimensi Standar Layak Hidup	62
4.4	Faktor yang Paling Berpengaruh Signifikan terhadap Perubahan Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Badung tahun 2023	63
BAB 5	Simpulan dan Saran	64
5.1	Simpulan	64
5.2	Saran	65
Daftar Pustaka		67

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Kesetaraan Gender Sebagai Tujuan Kelima <i>Sustainable Development Goals</i>	2
Gambar 1.2 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia	4
Gambar 4.1 Grafik IPG tipp Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Thun 2023	35
Gambar 4.2 Peningkatan IPG dari Tahun 2017 Sampai 2023	37
Gambar 4.3 Rata-rata Lama Sekolah Siswa Kabupaten Badung	45
Gambar 4.4 Grafik Anika Harapan Hidup (AHH) berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Badung Tabun 2016-2023	58
Gambar 4.5 Grafik Renata Lama Sekolah (RLS) berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Badung Tabun 2016-2023	59
Gambar 4.6 Grafik Harapan Lama Sekolah (HLS) berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Badung Tabun 2016-2023	61
Gambar 4.7 Grafik Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (ribu rupiah) berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Badung Tabun 2016-2023	62

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Badung.....	6
Tabel 3.1 Nilai Maksimum dan Minimum Masing-Masing Komponen IPG	27
Tabel 4.1 Rata-rata Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin...	33
Tabel 4.2 Data Indeks Pembangunan Manusia berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Badung	34
Tabel 4.3 Data Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Badung	35
Tabel 4.4 Data Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Badung	45
Tabel 4.5 Data Pengeluaran per Kapita (ribu rupiah) berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Badung ...	49
Tabel 4.6 Data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Persen) berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Badung ..	50
Tabel 4.7 Proporsi Perempuan Pernah Kawin 15-49 tahun yang Melahirkan Anak Lahir Hidup Yang Pertama Kali Berumur Kurang dari 20 tahun (MHPK20) di Kabupaten Badung	51
Tabel 4.8 Data Pencari Kerja Kabupaten Badung	53
Tabel 4.9 Indeks Pemberdayaan Gender dan Komponennya.	55

BAB I

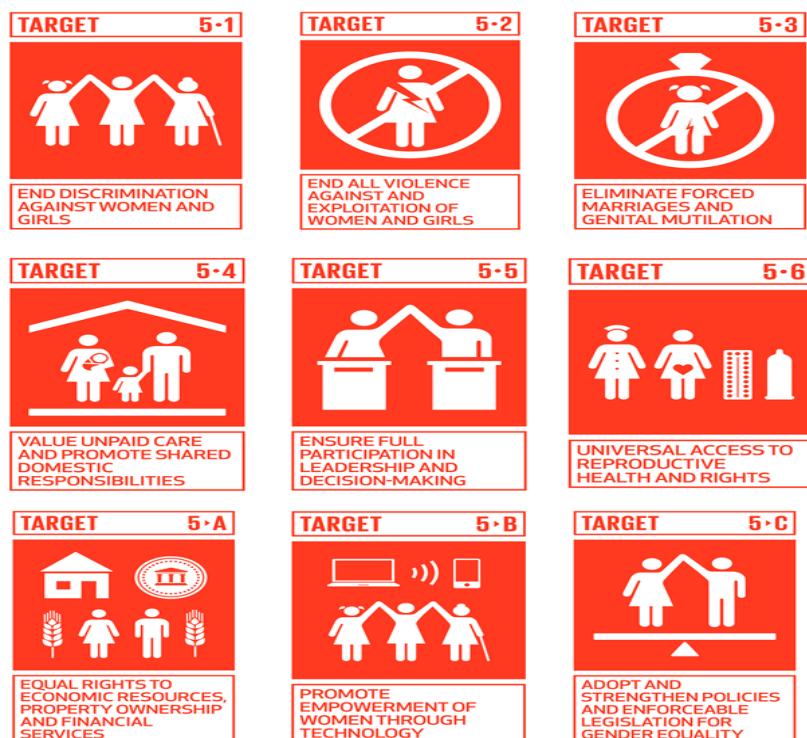
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak setiap warga negara untuk menikmati dan berpartisipasi dalam pembangunan berbagai sektor dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan bergantung pada keseimbangan partisipasi perempuan dan laki-laki di setiap aspek kehidupan. Ini karena perempuan mewakili hampir setengah dari populasi di dunia, sehingga hampir mustahil untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang inklusif tanpa kesetaraan gender. Pendidikan dan produktivitas perempuan, di sisi lain, harus menjadi prioritas utama untuk mendukung Visi Indonesia 2045 dan mencapai bonus demografi yang optimal. Untuk meningkatkan partisipasi laki-laki dan perempuan, diperlukan akses yang setara terhadap sumber daya dan kontrol. Dengan demikian, keuntungan dapat didistribusikan secara merata. Karena itu, kesetaraan gender semakin penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di semua bidang pembangunan, termasuk kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial, dan politik.

Kesetaraan gender merupakan prasyarat untuk dapat mencapai pertumbuhan sosial, politik, dan ekonomi yang berkelanjutan (*sustainable development*). Hal ini merupakan komitmen yang tertuang pada salah satu butir dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang telah disepakati oleh negara-negara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai tujuan ke-5 SDGs “*Gender Equality*”, yaitu “Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Semua Perempuan dan Anak Perempuan”.

Gambar 1.1
Kesetaraan Gender Sebagai Tujuan Kelima
Sustainable Development Goals



Sumber: **Majeed (2020)**

Konsep kesetaraan gender merujuk pada kesetaraan penuh laki-laki dan perempuan untuk menikmati rangkaian lengkap hak-hak politik, ekonomi, sipil, sosial dan budaya. Konsep ini juga merujuk pada situasi di mana tidak ada individu yang ditolak aksesnya atas hak-hak tersebut, atau hak-hak tersebut dirampas dari mereka, karena jenis kelamin (Rahmawati dan Hidayah, 2020). Biaya ekonomi yang lebih tinggi disebabkan oleh ketidaksetaraan gender, yang menyebabkan kesenjangan sosial dan penurunan kualitas lingkungan di seluruh dunia (Yildiz, 2016). Oleh karena itu, untuk mendukung tujuan pembangunan, kontribusi yang lebih besar dan pemberdayaan perempuan menjadi penting dalam pertumbuhan perekonomian.

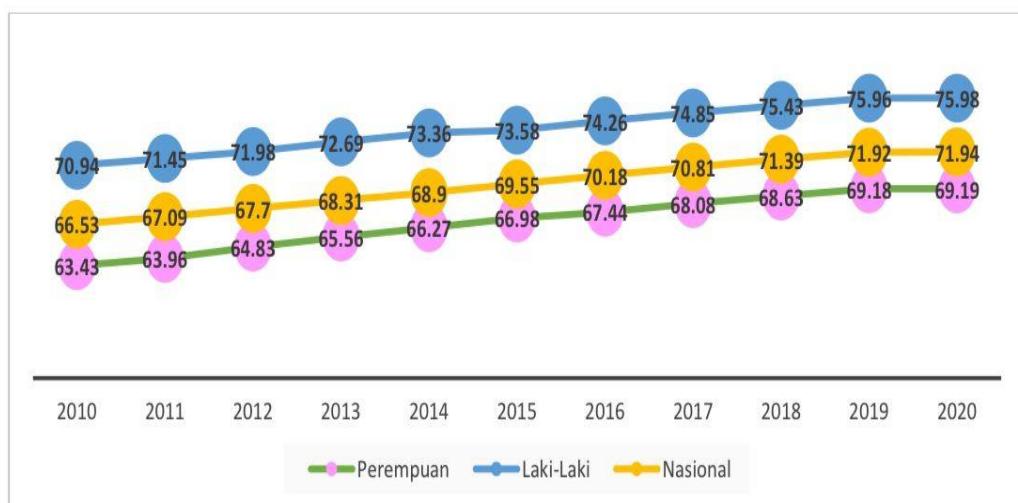
Pertumbuhan ekonomi memiliki arti penting yang tidak terbantahkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kesetaraan gender memiliki relevansi terhadap

perekonomian. Persoalan gender dan ekonomi di Indonesia menjadi sorotan penting dalam konteks ketidaksetaraan dan tantangan dalam mencapai pembangunan ekonomi yang inklusif dan adil (Hartono *et al.*, 2023). Meskipun Indonesia telah mengalami kemajuan ekonomi yang signifikan, ketidaksetaraan gender tetap menjadi hambatan dalam memastikan bahwa manfaat pembangunan ekonomi tersebut dirasakan secara merata oleh seluruh warga. Permasalahan utama terletak pada disparitas antara laki-laki dan perempuan di berbagai sektor ekonomi (Sari *et al.*, 2021). Meskipun banyak Perempuan terlibat dalam sektor informal, mereka sering kali tidak mendapatkan pengakuan yang setara dengan kontribusi mereka. Upah yang rendah, kurangnya akses terhadap peluang karier, dan kesenjangan dalam kepemimpinan menjadi beberapa persoalan yang dihadapi perempuan dalam dunia kerja (Sudirman & Susilawaty, 2022; Mustakimah *et al.*, 2023). McKinsey & Company (2018) menyatakan usaha untuk memberdayakan perempuan di Negara Asia Pasifik dapat memberikan tambahan USD4,5 triliun pada PDB di tahun 2025 atau setara dengan peningkatan sebesar 12 persen dari skenario baseline. Sementara menurut World Bank (2020), dengan mengurangi ketimpangan gender dalam angkatan kerja Indonesia, akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 9 persen pada tahun 2025.

Peningkatan kualitas dan kuantitas keterlibatan atau pemberdayaan perempuan dalam tenaga kerja dan aktivitas ekonomi akan membantu peningkatan pendapatan negara melalui peningkatan produktivitas secara agregat, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan keluarga dan negara. Selain itu dengan tercapainya kesetaraan gender, semua warga memiliki akses yang sama untuk meningkatkan produktivitas dalam perekonomian, baik produksi maupun komsumsi. Namun *Gender related index* di Indonesia merepresentasikan bahwa kesenjangan antara laki-laki dan perempuan masih terlihat pada beberapa bidang seperti bidang Pendidikan, bidang ekonomi, bidang Kesehatan, dan bidang politik. Pada beberapa bidang tersebut, perempuan masih relatif tertinggal jika

dibandingkan dengan angka pada indeks pengukuran kesetaraan gender, baik Indeks Pembangunan Gender (IPG) ataupun Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IPG maupun IDG sama-sama menunjukkan ketertinggalan perempuan jika dibandingkan laki-laki sehingga hal tersebut menjadi tantangan dalam pencapaian kesetaraan gender di Indonesia.

Gambar 1.2
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2021

Salah satu indikator penting yang digunakan untuk mengukur kesetaraan gender dalam pembangunan suatu wilayah adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG menilai sejauh mana pembangunan yang dicapai oleh suatu wilayah memperhatikan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti kesehatan, pendidikan, dan ekonomi (UNDP, 2020).

Di Kabupaten Badung, kesetaraan gender merupakan masalah penting yang saat ini berusaha meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Sebagai salah satu daerah di Provinsi Bali, Kabupaten Badung memiliki tanggung jawab strategis untuk mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk memenuhi hak asasi manusia dan memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi pada kemajuan ekonomi

dan sosial, pembangunan yang mempertimbangkan gender sangat penting (Laporan Tahunan Pembangunan Kabupaten Badung, 2022).

Survei Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Badung bertujuan untuk menilai dan memahami tingkat pencapaian kesetaraan gender di wilayah tersebut. Survei ini akan memberikan gambaran menyeluruh tentang berbagai aspek kesetaraan gender, seperti partisipasi perempuan dalam pendidikan, akses ke layanan kesehatan, dan keterlibatan mereka dalam ekonomi dan politik (Laporan Tahunan Pembangunan Kabupaten Badung, 2020).

Pada saat ini proyeksi penduduk Kabupaten Badung menurut kelompok umur dan jenis kelamin pada tahun 2024 sebanyak 568.550 jiwa (BPS Badung, 2024). Melihat kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Badung saat ini sedang bergerak pesat dalam melanjutkan kebahagiaan masyarakat Badung melalui pembangunan yang berlandaskan *Tri Hita Karana* yang sesuai dengan Visi Pemerintah Kabupaten Badung yang tertuang dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026.

Untuk melestarikan nilai sosial budaya berlandaskan *Tri Hita Karana*, berdasarkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) juga mempengaruhi tradisi, adat istiadat, bahasa, seni, dan berbagai bentuk warisan budaya lainnya, yang tidak bisa dilepaskan dari konteks gender yang mempengaruhi bagaimana nilai-nilai tersebut diteruskan dan dihargai oleh generasi berikutnya.

Kabupaten Badung telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pengarusutamaan Gender. Namun dalam implementasinya belum efektif. Berdasarkan hasil kajian Indek Pembangunan Gender Tahun 2023, ditemukan penyebab belum efektifnya pelaksanaan Perda tentang gender ini dikarenakan masing-masing perangkat daerah belum menunjuk *Focal Point* pada masing-masing instansinya. *Focal Point* ini sangat penting untuk mempromosikan Pengarusutamaan Gender pada unit kerjanya serta untuk memfasilitasi penyusunan data Gender pada masing-masing Perangkat Daerah. Sehingga hal ini mengakibatkan belum

terdapat data berbasis gender yang lengkap pada masing-masing perangkat daerah.

Kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Badung dalam pelestarian nilai sosial budaya berlandaskan Tri Hita Karana dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang artinya sebagai salah satu ukuran tingkat keberhasilan capaian pembangunan yang dapat mengakomodasi persoalan gender, begitu pula IPG digunakan untuk mengukur dan mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Dengan dilakukannya survey terhadap penyusunan IPG diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pembangunan yang sudah menggunakan konsep gender yang meliputi pencapaian kualitas hidup semua penduduk seperti kesehatan, pendidikan, dan ekonomi yang terefleksi dari capaian angka IPG. Disamping itu juga menyajikan pencapaian IPG pada Tingkat Kabupaten dan Kecamatan beserta disparitasnya.

**Tabel 1.1
Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG)
di Kabupaten Badung**

Tahun	IPG	Pertumbuhan
2013	94,69	-
2014	94,87	0,19
2015	94,55	-0,34
2016	94,27	-0,30
2017	94,39	0,13
2018	94,68	0,31
2019	95,5	0,87
2020	95,51	0,01
2021	95,53	0,02
2022	95,66	0,13

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2023

Berbagai Kebijakan dalam Pembangunan Gender di Kabupaten Badung telah di laksanakan sehingga terjadi peningkatan IPG. Pada tahun 2021 nilai IPG Kabupaten Badung adalah 95,53 dan pada tahun 2022 meningkat sebesar 13,60 persen menjadi 95,66. Berdasarkan hal

ini kesenjangan pembangunan di Kabupaten Badung masih terjadi, walaupun tingkat kesenjangannya mulai menurun.

Berdasarkan hal tersebut, untuk mengukur dan mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Badung maka diperlukan suatu kajian yang komprehensif melalui kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan dengan Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupa Survei Penyusunan Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Badung.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah tingkat pencapaian pembangunan manusia berbasis gender yang direpresentasikan oleh Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2023?
- 2) Bagaimanakah kondisi kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Badung?
- 3) Bagaimanakah indikator komposit dan indikator tunggal yang merepresentasikan pembangunan gender di Kabupaten Badung?
- 4) Faktor apakah yang paling berpengaruh signifikan terhadap perubahan Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Badung tahun 2023?

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud dari kegiatan penelitian ini untuk menghitung angka Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Badung Tahun 2023. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui tingkat pencapaian pembangunan manusia berbasis gender yang direpresentasikan oleh Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2023.
- 2) Untuk mengetahui kondisi kesenjangan pembangunan manusia

- antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Badung.
- 3) Untuk menghasilkan indikator komposit dan indikator tunggal yang merepresentasikan pembangunan gender di Kabupaten Badung.
 - 4) Untuk mengkaji faktor yang paling berpengaruh signifikan terhadap perubahan Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Badung tahun 2023.

1.4 Sasaran

Yang menjadi target kajian ini adalah teridentifikasinya berbagai permasalahan dan faktor penyebab kesenjangan manusia antara laki-laki dan perempuan serta diketahuinya indikator komposit dan indikator tunggal yang merepresentasikan pembangunan gender di Kabupaten Badung. Sedangkan sasaran dari kegiatan ini adalah seluruh masyarakat di Kabupaten Badung.

1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup atau spesifikasi penelitian ini meliputi pelaksanaan survei dan penghitungan pencapaian indeks pembangunan gender, memetakan kondisi kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Badung, dan memberikan rekomendasi serta hal esensial lainnya dalam indeks pembangunan gender.

1.6 Dasar Hukum

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6374 Tahun 2019);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 5. Peraturan Menteri PPPA Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyediaan Sarana Kerja yang Responsif Gender dan Peduli Anak di Tempat Kerja;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2023 tentang Satu Data Gender dan Anak
 8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Parameter Kesetaraan Gender Dalam Peraturan Perundangundangan Dan Instrumen Hukum Lainnya;
 9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Gender

Konsep gender sendiri dapat diartikan sebagai perbedaan peran, fungsi, status dan tanggung jawab pada laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari bentukan konstruksi sosial budaya yang tertanam lewat proses sosialisasi dari satu generasi ke generasi berikutnya (Chafetz 2006). Terdapat kata kunci "konstruksi" sosial dalam penjelasan tersebut, oleh karena itu dapat diketahui juga bahwa dalam konsep gender melekat sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial (melalui interaksi) dalam budaya, dimana sifat tersebut dapat ditukar dan berubah dari waktu ke waktu dan tempat satu ke tempat lainnya. Oleh karena itu, perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan ini bukan didasarkan pada perbedaan biologis melainkan disebabkan oleh faktor sosial budaya (Beauvoir 1989).

Gender berasal dari bahasa Inggris "gender", yang berarti "jenis kelamin". Menurut *Webster's New World Dictionary*, gender didefinisikan sebagai perbedaan yang jelas antara laki-laki dan perempuan dalam hal nilai dan perilaku (NasaruddinUmar:2010). Dalam Kamus Sosiologi Gender, para sosiolog dan psikolog mendefinisikan "laki-laki" dan "perempuan" dalam konteks sosiologi, keluarga, dan masyarakat. Psikolog membenarkan ini dengan mengatakan bahwa gender ditentukan oleh sosial dan budaya daripada biologi. Mereka percaya bahwa gender mewakili dan mendefinisikan kedua jenis kelamin. Perbedaan budaya: faktor sosial dan budaya mempengaruhi, tetapi faktor gender menunjukkan bahwa gender tidak masalah (Vina, Tutik: 2010).

Saat ini, kesetaraan gender masih menjadi masalah yang sering diperdebatkan, memunculkan keuntungan dan kelemahan di berbagai negara, seperti Indonesia. Ini menjadi lebih jelas dengan

munculnya gerakan feminis di Benua Eropa dan Amerika, yang menginginkan kesetaraan status dan sikap antara laki-laki dan perempuan. Akibatnya, konsep 50:50, yang dikenal sebagai persamaan mutlak, persamaan kedudukan, dan persamaan antar lelaki dan perempuan muncul (Lulu, 2023).

Kesetaraan gender dalam Munasinghe dkk (Hariadinata:2019), berarti bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki kebebasan hukum, keadaan, dan derajat hidup yang sama. Salah satu hak asasi manusia adalah kesetaraan gender. Gender adalah pemisahan tugas, tanda, ciri kepribadian, dan tingkah laku yang dibentuk dan berkembang dalam masyarakat. Attribute gender terdiri dari atribut produktif, atribut reproduktif, dan atribut sosial. Selama bertahun-tahun, bagaimanapun, perempuan sering dianggap sebagai makhluk yang lemah dan berfungsi sebagai perlengkapan. Lebih lanjut, banyak orang percaya bahwa tugas perempuan hanyalah memasak, mengatur rumah, dan mengasuh anak. Akibatnya, orang pikir orang yang bekerja di luar menjadi tidak berguna.

Dalam hal ini peran gender merupakan peran yang diambil oleh perempuan dan laki-laki dengan kondisi lingkungan, budaya dan struktur masyarakat. Peran-peran tersebut diajarkan kepada setiap anggota masyarakat, komunitas dan kelompok sosial tertentu, khususnya peran perempuan dan laki-laki, terdapat empat jenis peran gender, yaitu:

1) Peran Gender

Peran gender adalah peran yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan berdasarkan situasi, lingkungan, budaya, dan struktur sosial. Peran-peran ini diajarkan kepada anggota berbagai kelompok sosial, yang dianggap sebagai peran sosial, komunal, dan etnis. Peran laki-laki dan perempuan terbagi menjadi peran produktif, peran reproduktif, dan peran sosial.

2) Peran Produktif

Peran produksi mengacu pada kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa layanan konsumen dan komersial (Bhasin, 2000). Semua

pekerjaan ini dilakukan di pabrik, kantor, peternakan, dan tempat-tempat lain di mana produk domestik bruto dihitung dengan menggunakan kegiatan-kegiatan ini. Meskipun baik perempuan maupun laki-laki berpartisipasi dalam masyarakat melalui kegiatan produktif, masyarakat masih berasumsi bahwa laki-laki mengurus keluarga mereka. Misalnya, di tempat kerja, PHK sering kali dipandang sebagai kegiatan yang ramah terhadap laki-laki dan oleh karena itu perempuan menjadi sasarannya. Uraian tugas mengingat kegiatan mencari uang atau barang, kegiatan perempuan dan laki-laki, di luar rumah atau di sektor formal dan informal di sektor domestik, dari mana uang atau barang tersebut diperoleh. Uang atau benda dianggap produktif.

3) Peran Reprouktif

Penyajiannya dibagi menjadi dua kategori: biologis dan sosial. Manifestasi fisik berarti kelahiran kembali - suatu tindakan yang hanya dapat dilakukan oleh wanita. Produktivitas sosial mengacu pada semua kegiatan pemeliharaan dan pengembangan yang diperlukan untuk pelayanan dan kelangsungan hidup. (Bhasin, 2000). Dengan demikian, kegiatan reproduksi adalah kegiatan memperbanyak tenaga kerja manusia. Perawatan anak, memasak, memberi makan, mencuci, membersihkan, merawat dan aktivitas rumah tangga lainnya semuanya termasuk dalam kategori ini.

4) Peran Sosial (Kemasyarakatan)

Pengabdian masyarakat mengacu pada semua kegiatan yang diperlukan untuk mengarahkan dan mengatur kehidupan di masyarakat. Peran perempuan pengusaha komunitas dalam kegiatan organisasi seperti pelayanan kesehatan di Posyandu, partisipasi dalam kegiatan sosial budaya (kerja bakti, koperasi, pembangunan jalan di desa, dll). Semua ini biasanya dilakukan oleh para sukarelawan. Namun, peran sosial laki-laki seringkali terbatas pada posisi sosial tertentu, seperti RT, RW, kepala desa.

2.2 Bentuk Ketidakadilan Gender

Menurut Fakih (2008) ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk seperti subordinasi, marginalisasi, stereotip, kekerasan, dan beban ganda. Bentuk-bentuk ketidakadilan gender tersebut saling terkait dan berpengaruh satu dengan lainnya, diantaranya bentuk-bentuk ketidakadilan gender sebagai berikut:

- 1) Subordinasi artinya penilaian atau anggapan terhadap peranan seseorang dilakukan oleh salah satu gender sebagai lebih penting atau lebih penting dibandingkan gender lainnya. Selama ini terdapat anggapan bahwa kedudukan dan peran perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Misalnya, anak perempuan pada umumnya tidak mempunyai akses terhadap hak pendidikan yang sama dengan anak laki-laki. Ketika keuangan keluarga terbatas maka hak atas pendidikan lebih banyak diberikan kepada anak laki-laki, meskipun jika kita perhatikan bukan berarti anak perempuan tidak mampu.
- 2) Marginalisasi berarti proses marginalisasi atau terpinggirkan, sehingga anak perempuan dimasukkan ke sekolah untuk bekerja sebagai guru, perawat, dan sekretaris. Ironisnya, pekerjaan-pekerjaan ini kurang berharga dibandingkan pekerjaan laki-laki lainnya.
- 3) Stereotip adalah pemberian label atau lukisan terhadap seseorang atau kelompok berdasarkan stereotip yang salah atau menyesatkan. Tanda atau sikap terhadap suatu kelompok atau ras tertentu seringkali bersifat negatif dan seringkali berujung pada ketidakadilan. Ini juga merupakan sifat memiliki hubungan yang tidak setara atau tidak konsisten dengan tujuan mendominasi atau mengendalikan pihak lain. Kita sering melihat postingan negatif terhadap perempuan. Misalnya, perempuan menganggap pekerjaannya hanya sebagai pekerjaan rumah tangga. Menyebut perempuan sebagai “domestik” adalah hal yang berbahaya jika mereka ingin berpartisipasi dalam “aktivitas laki-laki” seperti

politik, bisnis, atau manajemen. Pada saat yang sama, gagasan bahwa laki-laki adalah pencari nafkah utama berarti bahwa penghasilan perempuan dianggap sebagai pekerjaan paruh waktu atau tambahan dan seringkali diabaikan.

- 4) Kekuasaan adalah salah satu bentuk komunikasi verbal dan non-verbal individu atau kelompok diperlakukan dengan cara yang berdampak negatif secara fisik, emosional, dan psikologis. Contoh kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan berbasis gender, dan kekerasan berbasis gender menunjukkan bahwa perempuan terus menjadi korban. di dalam dan di luar keluarga. Kekerasan adalah tindakan fisik, fisik atau non-fisik terhadap gender atau institusi keluarga, masyarakat atau negara. Sadarilah bahwa spesies jantan dan betina dibingungkan karena berbeda. Persepsi laki-laki terhadap atribut mental laki-laki dan perempuan, seperti keberanian, kekuatan, dll. Namun perempuan dianggap penurut, lemah, dll; Sama sekali tidak ada yang salah dengan hal itu. Namun perbedaan tersebut berujung pada kekerasan. Menganggap perempuan sebagai lemah, ceroboh dan rajin adalah alasan perlakuan terhadap mereka. Diverse Violence berkomitmen untuk memerangi kekerasan dalam rumah tangga, pemerkosaan, kekerasan seksual, kekerasan berbasis gender, prostitusi.
- 5) Beban ganda adalah beban yang lebih ditanggung oleh satu gender. Ketika perempuan masuk PNS, beban keluarga tidak selalu berkurang. Kedua tugas ini harus dipenuhi baik di sektor publik maupun swasta. Wanita mengurus pekerjaan rumah. Selain melakukan pekerjaan rumah tangga, perempuan juga harus menghidupi keluarganya melalui kebun. Dia bekerja keras dan dituduh mengabaikan tanggung jawab keluarga dan tidak tampil di depan umum. Ketidakadilan terjadi pada kelebihan dan waktu kerja, namun harganya lebih rendah dari rata-rata kerja.

Ketidakadilan gender adalah kondisi di mana satu jenis kelamin, biasanya perempuan, mengalami perlakuan yang tidak adil atau

diskriminatif dibandingkan dengan jenis kelamin lainnya, biasanya laki-laki. Bentuk-bentuk ketidakadilan gender ini dapat terjadi dalam berbagai aspek kehidupan seperti pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan sosial. Berikut adalah beberapa bentuk ketidakadilan gender dalam berbagai situasi meliputi:

1) Diskriminasi di Tempat Kerja

- a. Perbedaan Upah: Perempuan seringkali dibayar lebih rendah dibandingkan laki-laki untuk pekerjaan yang sama atau setara. Hal ini dikenal sebagai gender pay gap.
- b. Peluang Karier: Perempuan seringkali memiliki peluang promosi yang lebih rendah dan lebih sedikit dibandingkan laki-laki, meskipun memiliki kualifikasi yang sama.
- c. Pelecehan Seksual: Banyak perempuan menghadapi pelecehan seksual di tempat kerja, yang menciptakan lingkungan kerja yang tidak aman dan tidak nyaman.

2) Akses Terhadap Pendidikan

Di beberapa negara, anak perempuan memiliki akses yang lebih sedikit ke pendidikan dibandingkan anak laki-laki, yang menghambat mereka untuk mendapatkan peluang kerja yang lebih baik di masa depan.

3) Kesehatan

- a. Akses ke Layanan Kesehatan: Perempuan seringkali memiliki akses yang terbatas ke layanan kesehatan, terutama di negara-negara berkembang.
- b. Kesehatan Reproduksi: Perempuan seringkali tidak memiliki kendali penuh atas kesehatan reproduksi mereka, termasuk akses ke kontrasepsi dan layanan kesehatan terkait kehamilan dan persalinan.

4) Kekerasan Berbasis Gender

- a. Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perempuan lebih sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

- b. Perdagangan Manusia: Perempuan dan anak perempuan lebih rentan terhadap perdagangan manusia untuk eksplorasi seksual.
- 5) Kultur dan Tradisi

Norma Sosial: Banyak masyarakat masih memiliki norma dan tradisi yang membatasi peran perempuan, seperti pembatasan dalam pengambilan keputusan dan partisipasi dalam kehidupan publik.

Dalam hal ini, konsep kesetaraan gender mengacu pada kesetaraan gender yang dimiliki oleh banyak masyarakat Indonesia pecinta budaya timur yang sebagian besar beragama Islam. Menurut Islam, kesetaraan laki-laki dan perempuan bermula dari kenyataan bahwa Tuhan menciptakan manusia dan alam semesta secara selaras. Oleh karena itu, nilai kesetaraan adalah persamaan, keadilan dan kebebasan laki-laki dan perempuan. Nilai-nilai tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

1) Nilai Kesetaraan

Setara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yaitu sejajar (tinggi yang sama, dll.) juga dapat dipahami sebagai sama level (posisi, dll.); sebanding, sepadan dan keseimbangan. Kesetaraan gender berarti kondisi yang setara antara laki-laki dan perempuan. Perempuan mendapatkan peluang dan hak orang yang mampu memainkan peran dan berpartisipasi dalam aktivitas politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan negara keamanan nasional dan kesetaraan dalam menikmati hasilnya mengembangkan. Di era milenial, perubahan sangatlah diperlukan. Hal besarnya berkaitan dengan hubungan gender, khususnya hubungan mensyaratkan adanya kesetaraan peran antara laki-laki dan perempuan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2) Nilai Keadilan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adil adalah sama, tidak memihak, tidak berat sebelah, berpihak pada apa yang benar dan tidak. Sedangkan keadilan diartikan sebagai suatu sifat atau perbuatan atau perlakuan yang adil. Menurut istilah ini, adil berarti menyatakan suatu fakta terhadap dua masalah atau lebih yang perlu diselesaikan menurut aturan yang ditetapkan agama. Dengan banyak arti berbeda “adil” .dalam arti luas dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana terdapat perlakuan yang sama di mata hukum, hak atas kompensasi yang sama, hak atas kehidupan yang bermartabat, hak atas pembangunan dan dimana tidak ada hal-hal tersebut, pihak yang dirugikan dan tidak ada pihak yang dirugikan, ini tentang keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Dari beberapa definisi diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa, Keadilan adalah keadaan seimbang dan tidak memihak agar tidak terjadi ketidakadilan di antara kedua belah pihak dalam mencapainya tujuan tertentu.

Sehingga dalam ketidakadilan ini munculah paham Feminisme dimana Feminisme adalah gerakan untuk memahami memperjuangkan kesetaraan dan kebebasan dari ketidakadilan terhadap perempuan untuk mengubah situasi mereka. Dimana yang menganut paham tersebut adalah kaum feminis yang merasakan adanya ketidakadilan. Menurut para feminis ini, yang dimaksud dengan keadilan antara laki-laki dan perempuan adalah persamaan hak dan kewajiban di antara mereka.

3) Nilai Kebebasan

Kebebasan, atau yang sering dikenal pada bentuk independen, adalah permulaan dari kata bebas yang artinya leluasa sepenuhnya tanpa halangan, kebingungan,dan seterusnya hingga dapat beraksi, bercerita, bertindak dengan lepas. Kebebasan merupakan sebuah persepsi yang berasal dari pemikiran kebijakan serta menentukan kedudukan individu yang memperoleh hak untuk berbuat sesuai dengan keinginan.

2.3 Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender adalah kondisi di mana laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai potensi penuh mereka dalam segala aspek kehidupan. Hal ini mencakup akses yang sama terhadap sumber daya, hak, dan peluang, serta partisipasi yang setara dalam pengambilan keputusan. Kesetaraan gender bukan berarti bahwa laki-laki dan perempuan harus sama dalam segala hal. Perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan tetap diakui dan dihormati. Namun, perbedaan ini tidak boleh menjadi dasar untuk mendiskriminasi atau meniadakan hak-hak dan peluang individu.

World Bank menyebutkan bahwa kesetaraan gender merupakan persoalan pokok pembangunan yang akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan dan memerintah secara efektif. Dalam konteks itulah jika negara kita mau membangun pemerintahan yang maju setidaknya memperhatikan masalah secara khusus yang berkaitan dengan kesetaraan gender (Probosiwi, 2015). Lebih lanjut dijelaskan bahwa kesetaraan gender merupakan hak yang semestinya didapatkan agar laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan ikut berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan (BPS, 2014). Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas), serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan.

Kesetaraan gender memiliki banyak manfaat bagi individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Kesetaraan gender dapat meningkatkan kesejahteraan individu yaitu dapat meningkatkan kesehatan, pendidikan, dan tingkat pendapatan individu. Selain itu kesetaraan gender dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yakni

dengan meningkatkan produktivitas dan inovasi dalam angkatan kerja. Kesetaraan gender serta dapat memperkuat keluarga dengan meningkatkan hubungan dan stabilitas keluarga. Terakhir kesetaraan gender dapat membangun masyarakat yang lebih adil dan damai dengan dapat mengurangi diskriminasi dan kekerasan, dan mempromosikan perdamaian dan stabilitas.

Meskipun banyak kemajuan telah dicapai dalam beberapa dekade terakhir, masih banyak tantangan yang harus diatasi untuk mencapai kesetaraan gender. Adapun beberapa tantangannya yakni, laki-laki dan perempuan masih sering mengalami diskriminasi di berbagai bidang kehidupan, seperti pekerjaan, pendidikan, dan politik. Masih terdapat kekerasan terhadap perempuan masih menjadi masalah global yang serius. Selain itu masih terdapat stereotip gender dan norma sosial yang membatasi peran laki-laki dan perempuan masih terus ada. Terkait dengan kekurangan akses terhadap sumber daya juga perempuan sering kali memiliki akses yang lebih sedikit terhadap sumber daya seperti pendidikan, kesehatan, dan keuangan.

Upaya mencapai kesetaraan gender membutuhkan upaya dari semua pihak, termasuk pemerintah, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, dan individu. Adapun beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai kesetaraan gender adalah menerapkan kebijakan yang mempromosikan kesetaraan gender: Pemerintah dapat menerapkan berbagai kebijakan untuk mempromosikan kesetaraan gender, seperti undang-undang antidiskriminasi, cuti ayah, dan program pengasuhan anak. Meningkatkan kesadaran tentang kesetaraan gender dengan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesetaraan gender melalui pendidikan dan kampanye publik. Mendukung organisasi yang bekerja untuk kesetaraan gender dengan mendukung organisasi ini dengan menyumbang, menjadi sukarelawan, atau menyebarkan informasi tentang pekerjaan mereka. Menerapkan kesetaraan gender dalam kehidupan sehari-hari dengan menantang stereotip gender, menghargai keragaman, dan

memperlakukan semua orang dengan hormat. Berikut merupakan prinsip kesetaraan gender.

1) Kesetaraan Akses dan Kesempatan Perempuan dan laki-laki harus memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan tanpa diskriminasi.

2) Partisipasi Setara

Perempuan harus memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di semua tingkat, termasuk dalam keluarga, komunitas, dan pemerintahan.

3) Penghapusan Stereotip Gender

Stereotip dan norma sosial yang membatasi peran gender harus dihilangkan untuk memungkinkan individu memilih jalur hidup mereka tanpa terbatas oleh ekspektasi gender tradisional.

4) Perlindungan Hukum

Sistem hukum harus melindungi hak-hak perempuan dan memastikan bahwa mereka mendapatkan keadilan dalam kasus diskriminasi dan kekerasan.

5) Pemberdayaan Ekonomi

Perempuan harus didukung untuk mendapatkan keterampilan dan sumber daya yang mereka butuhkan untuk menjadi mandiri secara ekonomi.

6) Penghapusan Kekerasan Berbasis Gender

Semua bentuk kekerasan terhadap perempuan harus dihentikan, dan korban kekerasan harus mendapatkan dukungan dan perlindungan yang memadai.

2.4 Perspektif Gender Dalam Pelestarian Nilai Sosial Budaya

Kata pelestarian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “lestari” yang berarti tetap seperti keadaan semula, tidak berubah, bertahan kekal. Kemudian mendapat imbuhan *pe* dan akhiran *an*, menjadi pelestarian yang berarti; (1) proses, cara, perbuatan melestarikan; (2) perlindungan dari kemuatan dan kerusakan, pengawetan, konservasi; (3) pengelolaan sumber daya

alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan manjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya (Dugger, 1988). Dalam terminologi budaya, konsep pelestarian dapat mengandung dua pengertian yakni bermakna statis dan dinamis. Pelestarian dalam arti statis mencakup upaya pemertahanan keadaan aslinya dengan tidak merubah yang ada dan tetap mempertahankan kondisinya hingga sekarang (*existing condition*). Sedangkan pelestarian dalam arti dinamis bermakna upaya-upaya pemertahanan budaya yang disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan jaman. Dalam hal ini nilai-nilai inti suatu budaya tetap menjadi acuan sementara wujud sosial dan fisiknya menyesuaikan dengan kondisi perkembangan masyarakatnya (Geria (ed), 2010).

Perspektif gender dalam pelestarian nilai sosial budaya adalah pendekatan yang mengakui dan mempertimbangkan perbedaan peran, tanggung jawab, dan pengaruh antara laki-laki dan perempuan serta kelompok gender lainnya dalam masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua gender memiliki kesempatan yang setara untuk berkontribusi dan menikmati hasil dari pelestarian budaya (Sultana dan Farhana, 2010 dalam Moser, 1989). Berikut adalah beberapa karakteristik utama perspektif gender dalam pelestarian nilai sosial budaya:

1) Kesetaraan Gender dalam Partisipasi Publik

Pelestarian budaya yang mempertimbangkan perspektif gender memastikan bahwa baik laki-laki maupun perempuan, serta kelompok gender lainnya, memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam aktivitas budaya. Misalnya, dalam proses pengambilan keputusan mengenai pelestarian adat istiadat atau tradisi lokal, partisipasi dari semua gender harus dijamin agar representasi dan kepentingan setiap kelompok terakomodasi.

2) Pengakuan terhadap Peran Gender yang Beragam

Setiap gender memiliki peran yang berbeda dalam masyarakat dan dalam pelestarian budaya. Misalnya, perempuan sering kali

berperan sebagai penjaga tradisi keluarga dan pengajar nilai-nilai budaya kepada anak-anak, sementara laki-laki mungkin lebih terlihat dalam peran publik atau ritual formal. Perspektif gender menghargai dan mengakui pentingnya peran-peran ini serta mendorong kerjasama antar gender dalam melestarikan nilai budaya.

3) Akses yang Setara terhadap Sumber Daya Budaya

Perspektif gender berusaha memastikan bahwa semua gender memiliki akses yang sama terhadap sumber daya budaya, seperti pendidikan budaya, pelatihan, dan informasi mengenai warisan budaya. Ketidaksetaraan dalam akses dapat menyebabkan marginalisasi kelompok tertentu dan menghambat pelestarian budaya secara keseluruhan. Oleh karena itu, program-program pelestarian budaya harus dirancang agar inklusif dan aksesibel bagi semua gender.

4) Penghargaan terhadap Pengetahuan dan Praktik Tradisional Gender

Banyak praktik budaya dan pengetahuan tradisional yang diwariskan melalui jalur gender tertentu. Perspektif gender dalam pelestarian budaya menghargai dan mendokumentasikan pengetahuan ini, termasuk peran perempuan dalam seni tekstil, kuliner, dan praktik pengobatan tradisional, serta peran laki-laki dalam ritual-ritual tertentu. Pendekatan ini memastikan bahwa kontribusi semua gender diakui dan dilestarikan.

5) Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Budaya

Mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kebijakan budaya berarti setiap kebijakan atau program pelestarian budaya harus dianalisis dan dirancang dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap semua gender. Ini termasuk memastikan bahwa kebijakan tidak hanya netral gender tetapi juga aktif mempromosikan kesetaraan gender dalam semua aspek pelestarian budaya.

6) Advokasi dan Pendidikan Gender Sensitif

Pelestarian budaya yang sensitif gender juga melibatkan upaya advokasi dan pendidikan untuk meningkatkan kesadaran tentang

pentingnya kesetaraan gender dalam konteks budaya. Ini bisa mencakup pelatihan bagi pemangku kepentingan budaya, kampanye publik untuk menghargai peran gender dalam budaya, dan program pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai kesetaraan gender sejak usia dini.

Dengan memahami karakteristik ini, kita dapat mendorong pelestarian budaya yang lebih inklusif dan adil, yang tidak hanya menghormati tetapi juga memanfaatkan kekayaan peran dan kontribusi semua gender.

Pemerintah telah mengupayakan berbagai kebijakan untuk mengatasi permasalahan terkait gender. Salah satu alat ukur untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dilakukan pemerintah terkait kesetaraan gender yaitu melalui Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG merupakan salah satu indeks yang setiap tahun dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender. IPG diperoleh melalui perbandingan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan terhadap IPM laki-laki. IPG dapat menggambarkan kesenjangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan

Lokasi penelitian ini adalah Kabupaten Badung mengenai Indeks Pembangunan Gender (IPG). Melihat kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Badung saat ini sedang bergerak pesat dalam melanjutkan kebahagiaan masyarakat Badung melalui pembangunan yang berlandaskan *Tri Hita Karana* yang sesuai dengan Visi Pemerintah Kabupaten Badung yang tertuang dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026. Waktu pelaksanaan : 11 Juni 2024 sampai dengan 11 September 2024 atau selama tiga Bulan.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis yang dilakukan pada data primer maupun data sekunder. Kombinasi kedua data ini diperlukan untuk memperkuat pembahasan mengenai nilai IPG yang diperoleh. Hasil kajian juga akan diperkaya dengan pemodelan untuk mengetahui faktor mana yang paling signifikan dalam mempengaruhi IPG di Kabupaten Badung tahun 2023. Selain itu, untuk memperoleh data primer, dilakukan teknik observasi langsung kepada responden yang terdiri dari penanggung jawab bagian data dan informasi dari masing-masing Perangkat Daerah untuk mengetahui ketersediaan data terpisah berdasarkan gender.

Pendekatan IPG menggunakan 3 indikator untuk menghitung Indeks Pembangunan Gender pada Kabupaten Badung yang terdiri dari :

- a) Umur panjang dan hidup sehat (*A long and healthy life*)
- b) Pengetahuan (*Knowledge*)
- c) Standar hidup layak (*Decent standard of living*)

Ketiga indikator tersebut akan digunakan untuk mengukur IPG masyarakat di Kabupaten Badung. Secara metodologi, perhitungan IPG menggunakan indikator-indikator yang diturunkan dari ketiga standar tersebut. Indikator-indikator tersebut adalah indikator umur panjang dan hidup sehat. Pada indikator pengetahuan, digunakan data angka harapan lama sekolah dan angka rata-rata lama sekolah. Indikator standar hidup layak diukur dengan menggunakan data pengeluaran per kapita. Untuk menghitung IPG kabupaten Badung, didahului dari perhitungan IPM di masing-masing jenis kelamin berdasarkan ketiga indikator tersebut. Berdasarkan nilai IPM yang diperoleh maka IPG dapat ditentukan dengan merasikan IPG laki-laki dan perempuan.

1) Pengambilan Sampel

Sampel diambil secara purposive, dimana pengambilan sampel disesuaikan dengan tujuan dari kajian. Perangkat Daerah yang dimasukkan sebagai sampel, ditentukan terlebih dahulu sesuai kebutuhan dalam pemodelan data yang dibutuhkan dalam penentuan determinan nilai IPG. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan lembar observasi digital ke Perangkat Daerah di Kabupaten Badung.

2) Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi dan observasi. Teknik dokumentasi digunakan dalam memperoleh data-data primer yang tersebar dalam hasil-hasil suvey yang telah dilakukan lembaga resmi pemerintah. Teknik observasi digunakan dalam mendapatkan data-data yang bersumber dari Perangkat Daerah Kabupaten Badung yang belum terpublikasi namun telah terekam dalam pusat data di masing-masing Perangkat Daerah. Data-data tersebut kemudian akan diolah untuk dapat memodelkan IPG di Kabupaten Badung.

3.3 Teknik Analisis Data

Pendekatan dalam perhitungan IPG dilakukan dengan menyusun indeks komposit. Penyusunan indeks komposit dilakukan dengan membangun indeks untuk masing-masing indikator. Masing-masing indikator akan memiliki nilai minimum dan maksimum. Adapun Komponen-komponen dalam mengukur Indeks Pembangunan Gender adalah:

1. Angka Harapan Hidup saat Lahir – AHH (*Life Expectancy – e0*).

Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH) merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Angka Harapan Hidup yang digunakan dalam perhitungan IPG bersumber dari statistik gender BPS di tahun 2023. Indeks harapan hidup dihitung dengan menghitung nilai maksimum dan nilai minimum harapan hidup sesuai standar UNDP, yaitu angka tertinggi sebagai batas atas untuk penghitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah adalah 20 tahun.

2. Rata-rata Lama Sekolah – RLS (*Mean Years of Schooling – MYS*).

Rata-rata Lama Sekolah didenisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. Angka Rerata Lama Sekolah yang digunakan dalam perhitungan IPG bersumber dari statistik gender BPS di tahun 2023

3. Harapan Lama Sekolah – HLS (*Expected Years of Schooling – EYS*).

Angka Harapan Lama Sekolah didenisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk

untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Angka Harapan Lama Sekolah yang digunakan dalam perhitungan IPG bersumber dari statistik gender BPS di tahun 2023.

4. Pengeluaran per Kapita disesuaikan.

Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*Purcashing Power Parity/PPP*). Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100. Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas nonmakanan. Metode penghitungan paritas daya beli menggunakan Metode Rao. Angka Harapan Hidup yang digunakan dalam perhitungan IPG bersumber dari statistik gender BPS di tahun 2023.

Penyusunan komponen indeks komposit dimulai dengan membangun indeks untuk masing-masing komponen. Setiap komponen IPG distandardisasi dengan nilai minimum dan maksimum sebelum digunakan untuk menghitung IPG. Berikut ini adalah nilai maksimum dan minimum masing-masing komponen IPG.

Tabel 3.1

Nilai Maksimum dan Minimum Masing-Masing Komponen IPG

Komponen	Satuan	Maksimum		Minimum	
		Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	85	85	20	20
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	18	18	0	0
Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	15	15	0	0

Pengeluaran Perkapita Di sesuaikan	Rupiah	26.572.352	1.007.436
---	--------	------------	-----------

Sumber: BPS Kabupaten Badung, 2024

Penyusunan indeks untuk indikator dalam dimensi kesehatan, dimensi pengetahuan dan dimensi pengeluaran menggunakan rumus sebagai berikut:

Dimensi Kesehatan:

$$I_{Kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$$

Dimensi Pendidikan:

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

$$I_{Pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

Dimensi Pengeluaran:

$$I_{Pengeluaran} = \frac{In_{(pengeluaran)} - In_{(pengeluaran_{min})}}{In_{(pengeluaran_{maks})} - In_{(pengeluaran_{min})}}$$

Keterangan:

I_{Kesehatan} = Indeks Kesehatan

AHH = Angka Harapan Hidup

I_{pengetahuan} = Indeks Pengetahuan

I_{HLS} = Indeks Harapan Lama Sekolah

I_{RLS} = Indeks Rata-rata Lama Sekolah

HLS = Harapan Lama Sekolah

RLS = Rata-rata Lama Sekolah

I_{pendapatan} = Indeks Pendapatan

Adapun penghitungan IPM Perempuan dan IPM Laki-Laki sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks pendapatan, dengan rumus sebagai berikut:

$$IPM_{Laki-Laki} = \sqrt[3]{I_{Kesehatan} \times I_{Pendidikan} \times I_{Pengeluaran}} \times 100$$

$$IPM_{Perempuan} = \sqrt[3]{I_{Kesehatan} \times I_{Pendidikan} \times I_{Pengeluaran}} \times 100$$

Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok (Kemen PPPA, 2022), antara lain:

1. Kelompok “sangat tinggi”: $IPM \geq 80$
2. Kelompok “tinggi”: $70 \leq IPM < 80$
3. Kelompok “sedang”: $60 \leq IPM < 70$
4. Kelompok “rendah”: $IPM < 60$

IPG dihitung sebagai rasio antara (Indeks Pembangunan Manusia Perempuan) dengan (Indeks Pembangunan Manusia Laki-laki), menggunakan rumus sebagai berikut:

$$IPG = \frac{IPM_P}{IPM_L} \times 100$$

Interpretasi angka IPG, jika semakin mendekati nilai 100 maka capaian pembangunan kapabilitas antara laki-laki dengan perempuan semakin setara. Sebaliknya jika semakin jauh dari nilai 100 maka semakin terjadi ketimpangan pembangunan kapabilitas antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, berdasarkan Laporan dari UNDP (2022), status capaian IPG dapat diukur menjadi:

1. Kesetaraan Gender Tinggi ($|IPG-100| \leq 2,5$);
2. Kesetaraan Gender Menengah Tinggi ($2,5 < |IPG-100| \leq 5$);
3. Kesetaraan Gender Menengah (5 < $|IPG-100| \leq 7,5$);
4. Kesetaraan Gender Menengah Rendah ($7,5 < |IPG-100| \leq 10$);
5. Kesetaraan Gender Rendah ($|IPG-100| > 10$).

Selain penyusunan indeks pembangunan gender, dilakukan pula pemodelan yang bertujuan untuk mendapatkan sebuah model yang berguna dalam memprediksi IPG berdasarkan input variabel yang

signifikan berpengaruh terhadap IPG di Kabupaten Badung. Pemodelan ini juga melibatkan indikator-indikator yang berasal dari tiga faktor yaitu faktor pendidikan, faktor ekonomi dan faktor kesehatan.

Latar belakang pendidikan yang belum setara antara laki-laki dan perempuan menjadi faktor penyebab ketidaksetaraan gender dalam semua sektor. Rendahnya tingkat pendidikan penduduk perempuan menyebabkan perempuan belum bisa berperan lebih besar dalam pembangunan. Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan indikator dasar untuk mengukur daya serap pendidikan terhadap penduduk usia sekolah.

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang bersifat multidimensional, yang melibatkan perubahan besar, antara lain perubahan struktur ekonomi, perubahan sosial dan mengurangi kemiskinan. Pertumbuhan jumlah angkatan kerja dianggap sebagai faktor positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. Jika angkatan kerja tersedia dalam jumlah yang besar maka tersedia juga lebih banyak pekerja yang produktif (Todaro dan Smith, 2006). Dalam pembangunan ekonomi, pengangguran merupakan masalah yang cukup serius. Kecilnya Tingkat Pengangguran Terbuka mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang baik. Semakin tinggi tingkat kesehatan masyarakat, maka dapat dikatakan semakin baik pula tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut.

Berdasarkan teori L. Blum (Notoadmojo, 2007) dalam publikasi BPS (2016) menyatakan bahwa derajat kesehatan penduduk dapat diukur dari angka kematian (mortalitas) dan angka kesakitan (morbiditas). Angka kesakitan adalah persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan yang menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Angka ini merupakan salah satu indikator yang menentukan derajat kesehatan penduduk (BPS, 2016).

Adapun definisi operasional tiap variabel yang digunakan dalam pemodelan ini adalah:

- a. Variabel y merupakan variabel respon yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang dinyatakan dalam bentuk persentase. IPG merupakan suatu indeks yang mengukur pencapaian pembangunan kapabilitas dasar manusia pada bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi di suatu wilayah dengan mempertimbangkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan (BPS, 2015).
- b. Variabel x_1 , x_2 dan x_3 merupakan variabel prediktor yang menyatakan Angka Partisipasi Sekolah penduduk perempuan. Angka Partisipasi Sekolah adalah proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuhi) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Kelompok umur 7-12 tahun merupakan kelompok umur SD/Sederajat, umur 13-15 tahun merupakan kelompok umur SMP/Sederajat, umur 16-18 tahun merupakan kelompok umur SMA/Sederajat (BPS, 2015).
- c. Variabel x_4 merupakan variabel prediktor yang menyatakan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) penduduk perempuan. TPAK merupakan persentase jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja (jumlah penduduk usia 15 tahun keatas). TPAK digunakan untuk mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah (BPS, 2015).

Berdasarkan kajian empiris yang telah dilakukan, IPG tahun 2023 akan dimodelkan dengan pendekatan regresi time series untuk mendapatkan model terbaik dalam melakukan prediksi IPG pada tahun mendatang.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Tingkat Pencapaian Pembangunan Manusia Berbasis Gender Yang Direpresentasikan Oleh Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2023

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan salah satu indikator penting yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian pembangunan manusia dengan memperhatikan dimensi kesetaraan gender. IPG menggambarkan seberapa jauh pencapaian pembangunan manusia — yang diukur melalui indikator kesehatan, pendidikan, dan standar hidup — dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Semakin tinggi nilai IPG, semakin dekat pencapaian antara laki-laki dan perempuan dalam akses terhadap sumber daya dan kesempatan, menandakan bahwa kesetaraan gender di wilayah tersebut semakin baik.

IPG ini menjadi tolok ukur penting karena membantu mengidentifikasi adanya ketimpangan gender dalam pencapaian pembangunan manusia. Ketika kesetaraan gender tercapai, laki-laki dan perempuan akan memiliki kesempatan yang setara dalam mengakses pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, dan standar hidup yang layak, sehingga mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan menganalisis data IPG, pemerintah dan pemangku kebijakan dapat mengidentifikasi wilayah atau sektor yang membutuhkan intervensi kebijakan lebih lanjut untuk mencapai kesetaraan gender dan mendorong partisipasi perempuan dalam berbagai bidang, seperti pendidikan dan ekonomi. Ini juga menjadi dasar untuk meningkatkan program-program yang mendukung kesetaraan dan pemberdayaan gender sebagai bagian integral dari pembangunan manusia. Perhitungan IPG berdasarkan data yang telah diperoleh untuk masing-masing angka komponen sebagai berikut:

Tabel 4.1
Perhitungan IPG tahun 2023 berdasarkan
IPM per Jenis Kelamin

Komponen	Satuan	Nilai Aktual		Maksimum		Minimum	
		Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perem-puan	Laki-Laki	Perem-puan
Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	74,02	77,78	85	85	20	20
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14,51	14,03	18	18	0	0
Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	11,32	10,52	15	15	0	0
Pengeluaran Perkapita Disesuaikan	Rupiah	20.352.000	17.596.000	26.572.352		1.007.436	

Sumber: Data Diolah, 2024

Berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dilakukan analisis untuk mendapatkan indeks indikator dalam dimensi kesehatan, dimensi pengetahuan dan dimensi pengeluaran. Adapun hasil penghitungan IPM Perempuan dan IPM Laki-Laki sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks pendapatan adalah:

IPM Laki-Laki: 85,42

IPM Perempuan: 81,92

Capaian pembangunan manusia di Kabupaten Badung termasuk dalam kelompok Sangat Tinggi baik pada laki-laki maupun perempuan (Kemen PPPA, 2022)

IPG dihitung sebagai rasio antara (Indeks Pembangunan Manusia Perempuan) dengan (Indeks Pembangunan Manusia Laki-laki), menggunakan rumus sebagai berikut:

$$IPG = \frac{81,92}{85,42} \times 100 = 95,94$$

Angka yang diperoleh ini mendekati nilai 100 sehingga capaian pembangunan kapabilitas antara laki-laki dengan perempuan semakin setara. Selain itu, berdasarkan Laporan dari UNDP (2022), status

capaian IPG ini tergolong Kesetaraan Gender Menengah Tinggi ($2,5 < |95,94-100| \leq 5$). Secara historis, nilai IPM dari 2019-2023 dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.2
Data Indeks Pembangunan Manusia berdasarkan Jenis Kelamin
Kabupaten Badung

Gender	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Laki-Laki	83,95	83,96	84,19	84,46	85,42
Perempuan	80,17	80,19	80,43	80,79	81,95

Sumber: BPS Kabupaten Badung, 2024

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Badung menunjukkan adanya perbedaan yang konsisten antara laki-laki dan perempuan. IPM laki-laki meningkat dari 83,95 pada tahun 2019 menjadi 85,42 pada tahun 2023, sementara IPM perempuan juga meningkat dari 80,17 menjadi 81,95 dalam periode yang sama. Meskipun keduanya mengalami peningkatan, IPM perempuan tetap berada di bawah laki-laki, menunjukkan bahwa perempuan masih memiliki akses yang lebih rendah terhadap pendidikan, kesehatan, dan pendapatan dibandingkan laki-laki.

Perbedaan IPM ini mencerminkan bahwa meskipun perempuan telah mengalami peningkatan dalam pembangunan manusia, mereka masih tertinggal dibandingkan dengan laki-laki. Ketertinggalan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk akses yang tidak merata terhadap pendidikan dan pekerjaan yang layak. Kesenjangan ini juga tercermin dalam Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang mencapai 95,94 pada tahun 2023, yang menunjukkan bahwa adanya kemajuan dalam mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan.

Di sisi lain, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) yang menurun dari 0,149 pada tahun 2019 menjadi 0,126 pada tahun 2023 menunjukkan bahwa ketimpangan gender telah berkurang, tetapi tidak sepenuhnya

hilang. Ketimpangan gender dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pasar tenaga kerja masih menjadi tantangan utama yang perlu diatasi.

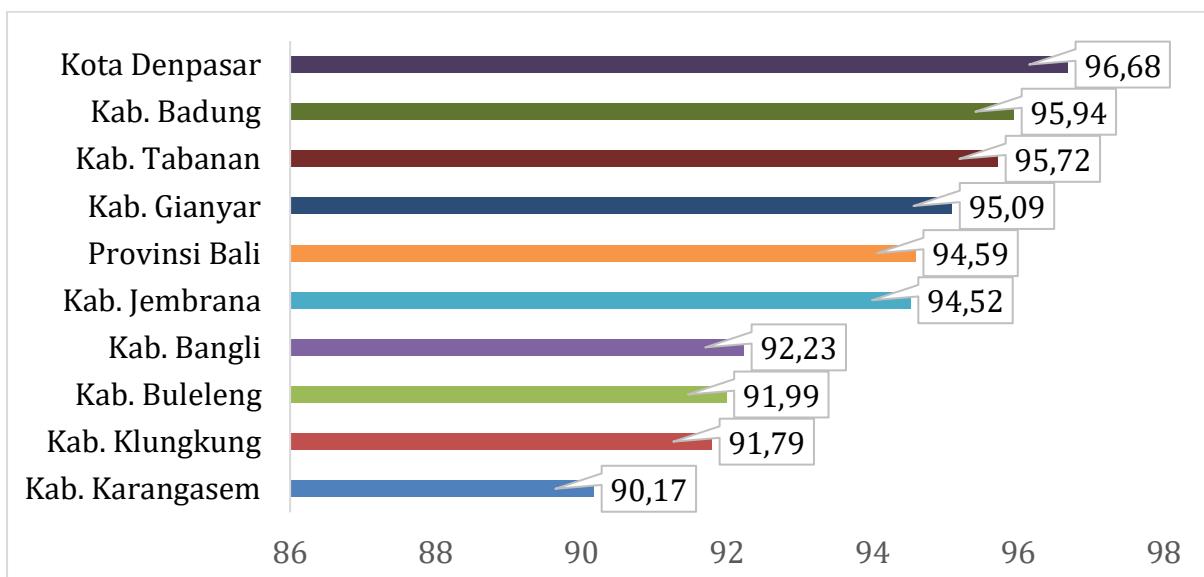
Tabel 4.3
Data Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Badung

Komponen	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
IKG	0,149	0,142	0,13	0,118	0,126

Sumber: BPS Kabupaten Badung, 2024

Meskipun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan adanya peningkatan bagi kedua gender, perbedaan yang signifikan dalam IPM antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Badung menunjukkan adanya ketidakmerataan dalam pencapaian kesejahteraan. Menjabarkan hasil tersebut, khususnya di Provinsi Bali diperoleh sebaran nilai IPG tahun 2023 di tiap kabupaten sebagai berikut:

Gambar 4.1
Grafik IPG tiap Kabupaten di Provinsi Bali Tahun 2023



Sumber: BPS Provinsi Bali, Tahun 2024

Grafik IPG pada gambar tersebut, menunjukkan perbedaan tingkat pembangunan gender di tiap kabupaten di Provinsi Bali. Kabupaten dengan IPG lebih tinggi (Denpasar, Badung, Tabanan, dan Gianyar) menunjukkan kesetaraan gender yang lebih baik, di mana laki-laki dan perempuan memiliki akses yang relatif seimbang dalam pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Sebaliknya, kabupaten dengan IPG lebih rendah menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam akses terhadap sumber daya dan kesempatan.

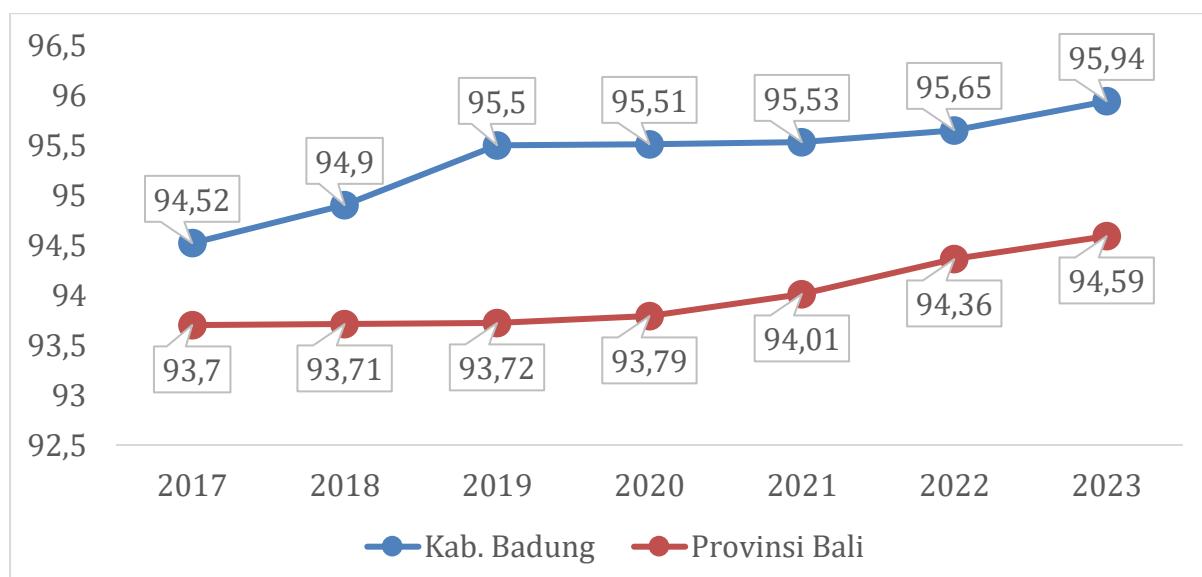
Kabupaten Badung yang berada diatas IPG rata-rata Provinsi Bali telah mampu menerapkan kebijakan-kebijakan yang mendukung kesetaraan gender secara efektif, seperti peningkatan akses pendidikan bagi perempuan, pemberdayaan ekonomi perempuan, atau peningkatan kesehatan reproduksi dan pelayanan kesehatan secara umum. Kabupaten dengan IPG tinggi menunjukkan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan daerah secara keseluruhan. Ini karena kesetaraan gender dapat meningkatkan partisipasi perempuan dalam pasar tenaga kerja, memperbaiki kualitas hidup, dan mendorong pembangunan sosial dan ekonomi yang lebih inklusif.

Walaupun Kabupaten Badung masuk dalam kategori di atas rata-rata provinsi, namun masih lebih rendah dari Kota Denpasar. Apalagi pada tahun 2023, Kota Denpasar berhasil meraih penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya dengan kategori tertinggi (Mentor). Hal ini disebabkan intensifnya pembangunan berbasis gender yang digerakkan oleh Kota Denpasar. Selain itu, didukung juga keberadaan pembangunan pemberdayaan yang terakomodir dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar. Selanjutnya, beberapa perda dan perwali yang terkait gender juga telah disahkan dalam upaya melindungi perempuan dan anak di Kota Denpasar. Berbagai upaya dalam merencanakan pengarusutamaan gender dilakukan dengan sinergi seluruh perangkat daerah terkait, sehingga terjadi kesinambungan dan keselarasan program yang mampu

mengurangi kesenjangan pembangunan manusia berbasis gender.

Ditinjau dari sisi geografis, kabupaten di wilayah perkotaan cenderung memiliki IPG lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten di wilayah pedesaan atau yang lebih terpencil. Hal ini karena akses ke layanan kesehatan, pendidikan, dan kesempatan ekonomi biasanya lebih baik di daerah perkotaan. Di sisi lain, daerah pedesaan mungkin menghadapi tantangan dalam infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang memengaruhi pembangunan gender. Jika melihat selisih IPG pada tingkat teratas dan terbawah, terjadi disparitas yang besar antara kabupaten, hal ini menunjukkan bahwa pembangunan gender masih tidak merata, dan beberapa kabupaten mungkin memerlukan perhatian lebih besar untuk memperbaiki ketimpangan gender.

Gambar 4.2
Tren IPG dari tahun 2017 sampai 2023



Sumber: BPS Provinsi Bali, 2024 (<https://bali.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTMyIzI=/indeks-pembangunan-gender-ipg-provinsi-bali-menurut-kabupaten-kota.html>)

Peningkatan IPG pada Badung dan Bali dari tahun ke tahun menunjukkan adanya perbaikan dalam kesetaraan gender, di mana

laki-laki dan perempuan memiliki akses yang lebih setara terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi. IPG Kabupaten Badung konsisten lebih tinggi daripada Provinsi Bali, ini menandakan bahwa Badung memiliki pencapaian yang lebih baik dalam kesetaraan gender dibandingkan rata-rata provinsi. Badung juga memiliki akses yang cukup baik terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang mendukung partisipasi perempuan. Perbandingan ini bisa memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan tentang bagaimana kebijakan lokal di Badung bisa mempengaruhi pencapaian gender.

4.2 Kondisi kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Badung

A. Angka Harapan Hidup saat Lahir

Pemerintah kabupaten Badung berusaha meningkatkan angka harapan hidup saat lahir dengan melaksanakan program inovasi Garbasari (gerakan Badung sehat 1000 hari pertama kehidupan). Garbasari merupakan suatu gerakan sinergis yang melibatkan unsur masyarakat dan pemerintah dalam upaya mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Garbasari adalah gerakan yang memperhatikan 1.000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan (HPK). Seribu hari angka pertama kehidupan dihitung mulai dari kehamilan (270 hari), hingga anak berusia dua tahun (730 hari). Program Garbasari juga memperhatikan pola gizi dan nutrisi remaja agar siap menjadi ibu yang sehat dengan melaksanakan poysandu remaja. Program Garbasari turut membentuk kelas ibu hamil, kelas balita, serta kelompok pendukung ASI.

Melalui program Garbasari, pemerintah mengadvokasi masyarakat agar berperan aktif dalam menurunkan angka stunting, menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Pemerintah Kabupaten Badung berkomitmen sebagai promotor menggandeng seluruh masyarakat agar melaksanakan program Garbasari melalui

penggunaan dana desa. Strategi dalam menggerakkan seluruh masyarakat adalah melakukan koordinasi melalui grup whatsapp, serta kampanye secara berkesinambungan agar terjadinya sinergi. Garbasari berhasil dilaksanakan pada 62 desa dan 16 kelurahan di bawah kecamatan. Pada tahun 2019 hingga tahun 2020, Garbasari sempat vakum dikarenakan pandemi covid-19 sehingga kelas ibu hamil dan poyandu dilaksanakan secara online. Pada tahun 2022, partisipasi desa mulai meningkat dikarenakan meningkatnya penganggaran dana desa yang diperuntukkan untuk program Garbasari.

Adapun hambatan dalam pelaksanaan program Garbasari adalah terbatasnya jumlah dan kualitas SDM yang paham dan mau mengimplementasikan pelaksanaan Garbasari sehingga diperlukan pendampingan secara berkala dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait. Hambatan lainnya adalah pemahaman pelaksanaan maupun stakeholder dalam pemanfaatan anggaran bahwa dana desa wajib untuk program kesehatan. Luas wilayah dari Kabupaten Badung juga menjadi tantangan bagi pelaksanaan program Garbasari, sehingga memerlukan pendekatan yang disesuaikan kondisi wilayah. Hambatan lainnya dalam pelaksanaan program Garbasari adalah pemenuhan sarana, prasarana, dan anggaran yang belum maksimal untuk mendukung pelaksanaan pelayanan, serta kondisi PAD yang menurun di Perangkat Daerah maupun desa serta kelurahan sehingga beberapa pos anggaran di refocusing. Kendala dalam pelaksanaan program Garbasari adalah tidak adanya anggaran bagi kelurahan, namun dinas kesehatan melakukan pendekatan dengan beberapa rumah sakit agar melaksanakan program CSR (*Corporate Social Responsibility*) untuk mendukung pelaksanaan Garbasari di tingkat kelurahan. Pada evaluasi yang dilaksanakan tanggal 27 Mei, terdapat 62 desa, dan 14 kelurahan yang sudah menerapkan program Garbasari. Penerapan program Garbasari

belum 100%, dimana dari 6 kegiatan wajib Garbasari, baru 5 yang terlaksana.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Badung menunjukkan adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. IPM laki-laki meningkat dari 83,95 pada tahun 2019 menjadi 85,42 pada tahun 2023, sementara IPM perempuan juga meningkat dari 80,17 menjadi 81,95 dalam periode yang sama. Meskipun keduanya mengalami peningkatan, IPM perempuan tetap berada di bawah laki-laki, menunjukkan bahwa perempuan masih memiliki akses yang lebih rendah terhadap pendidikan, kesehatan, dan pendapatan dibandingkan laki-laki. Dalam bidang kesehatan, angka harapan hidup perempuan cenderung lebih panjang dari laki-laki. Meskipun angka harapan hidup lebih panjang, namun menurut staff ahli menteri bidang penanggulangan kemiskinan kementerian PPPA, Titi Eko Rahayu angka kesakitan perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Dalam sebuah artikel ilmiah dari jurnal statistik ketahanan nasional ditemukan bahwa salah satu upaya yang dapat dilakukan kedepannya adalah program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, serta memaksimalkan kordinasi Pelayanan dan Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu terhadap Perempuan dan Anak (P2TP2A).

Strategi lainnya yang dapat dilakukan dalam mengatasi ketimpangan IPM laki-laki dan perempuan adalah dengan melaksanakan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan yang bukan saja dilakukan oleh pemerintah namun juga dalam keluarga dan pendidikan. Program-program yang sudah ada dapat dilaksanakan secara konsisten dan kontinyu, serta aktifnya dilaksanakan evaluasi, dan pendampingan. Rekomendasi lainnya adalah perlu untuk diprioritaskan beasiswa bagi perempuan yang memiliki minat dan bakat. Strategi lainnya juga mencakup keseimbangan pembangunan ekonomi oleh laki-laki dan perempuan, dimana capaian kualitas

hidup yang setara akan membuat perempuan memiliki akses yang lebih maksimal dalam bidang kesehatan.

B. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Pemerintah Kabupaten Badung berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan. Salah satu indikator keberhasilan pendidikan adalah harapan lama sekolah, yakni rata-rata jumlah tahun yang diharapkan ditempuh oleh seorang anak dalam mengikuti pendidikan formal.

Pada tahun 2024, Kabupaten Badung menargetkan peningkatan harapan lama sekolah sebagai bagian dari upaya menciptakan generasi yang lebih berpendidikan dan kompetitif di tingkat nasional maupun internasional. Dengan peningkatan akses terhadap pendidikan, baik di tingkat dasar maupun menengah, serta penguatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, harapan lama sekolah diharapkan dapat mencapai rata-rata lebih dari 12 tahun. Ini berarti anak-anak di Kabupaten Badung diharapkan dapat menempuh pendidikan hingga setara dengan jenjang SMA/SMK.

Langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk mencapai target menempuh pendidikan di Kabupaten Badung meliputi:

- 1) Peningkatan Fasilitas Pendidikan: Pemerintah Kabupaten Badung terus berupaya memperbaiki dan memperluas infrastruktur pendidikan, termasuk pembangunan sekolah-sekolah baru dan renovasi gedung yang sudah ada. Penyediaan sarana digital di sekolah-sekolah juga menjadi prioritas untuk mendukung pembelajaran yang lebih modern dan interaktif.
- 2) Pemberian Beasiswa dan Bantuan Pendidikan: Guna mendukung siswa dari berbagai latar belakang ekonomi, program beasiswa dan bantuan pendidikan diperluas. Dengan demikian, anak-anak dari keluarga kurang mampu

- tidak perlu khawatir akan biaya pendidikan dan dapat terus melanjutkan pendidikan hingga ke jenjang yang lebih tinggi.
- 3) Peningkatan Kualitas Guru dan Tenaga Pendidikan: Kualitas guru adalah kunci utama dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Oleh karena itu, program pelatihan dan peningkatan kompetensi guru akan terus dilakukan untuk memastikan bahwa guru-guru di Kabupaten Badung mampu mengajar dengan metode yang lebih efektif dan sesuai dengan perkembangan kurikulum terbaru.
 - 4) Penguatan Kurikulum Berbasis Keterampilan Hidup: Selain fokus pada aspek akademis, kurikulum yang diterapkan di Kabupaten Badung juga akan menekankan pada keterampilan hidup dan soft skills, seperti kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Dengan demikian, siswa tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga siap menghadapi tantangan dunia kerja dan masyarakat.

Ketimpangan dalam pencapaian pendidikan antara laki-laki dan perempuan masih terlihat di Kabupaten Badung. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kabupaten Badung, terdapat kecenderungan bahwa tingkat pendidikan laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Ada beberapa faktor utama yang mempengaruhi tren ini, yang dapat dikategorikan ke dalam aspek sosial, budaya, ekonomi, dan infrastruktur (Dinas Pendidikan Kabupaten Badung, 2022).

Salah satu faktor signifikan yang mempengaruhi ketimpangan gender dalam pendidikan di Kabupaten Badung adalah norma-norma sosial dan budaya yang berlaku. Meskipun Kabupaten Badung merupakan wilayah dengan ekonomi yang relatif maju karena sektor pariwisata, masih ada praktik-praktik tradisional yang menempatkan perempuan dalam peran domestik. Budaya patriarki di beberapa wilayah pedesaan menempatkan laki-laki sebagai pencari nafkah utama,

sementara perempuan cenderung diarahkan untuk mengurus rumah tangga dan anak. Pandangan ini membuat kesempatan perempuan untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi lebih rendah dibandingkan laki-laki.

Dari segi ekonomi, meskipun Kabupaten Badung merupakan daerah dengan tingkat pendapatan per kapita yang lebih tinggi dibandingkan daerah lain di Indonesia, disparitas ekonomi antar keluarga tetap ada. Dalam keluarga dengan keterbatasan ekonomi, sumber daya pendidikan sering kali lebih diprioritaskan untuk anak laki-laki. Hal ini berdasarkan anggapan bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab lebih besar sebagai kepala keluarga di masa depan, yang berujung pada keputusan untuk lebih mendukung pendidikan mereka.

Selain itu, keterbatasan akses dan ketersediaan fasilitas pendidikan di beberapa daerah terpencil di Badung juga menjadi penyebab ketimpangan. Meskipun kawasan wisata utama di Kabupaten Badung sangat maju, daerah-daerah pinggiran dan pegunungan masih menghadapi keterbatasan akses ke pendidikan yang memadai. Anak perempuan cenderung lebih terdampak oleh keterbatasan ini karena kekhawatiran terhadap faktor keamanan, jarak, dan lingkungan belajar yang belum memadai.

Berdasarkan proyeksi data yang dihimpun dari BPS Kabupaten Badung, tren ini diperkirakan masih akan berlanjut dalam beberapa tahun ke depan jika tidak ada intervensi yang signifikan. Namun, kebijakan pemerintah daerah yang mulai berfokus pada peningkatan akses pendidikan bagi perempuan, termasuk penyediaan beasiswa khusus bagi pelajar perempuan dan peningkatan fasilitas pendidikan di daerah pedesaan, diharapkan mampu mengurangi kesenjangan tersebut. Upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi perempuan juga menjadi kunci dalam mencapai kesetaraan gender di bidang Pendidikan (BPS, 2023).

Menurut laporan dari United Nations Development Programme (UNDP, 2021), pendidikan yang setara antara laki-laki dan perempuan akan memberikan dampak positif tidak hanya pada individu, tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan, termasuk peningkatan kesejahteraan dan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja. Dengan mempersempit kesenjangan gender di bidang pendidikan, Kabupaten Badung dapat mendorong pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

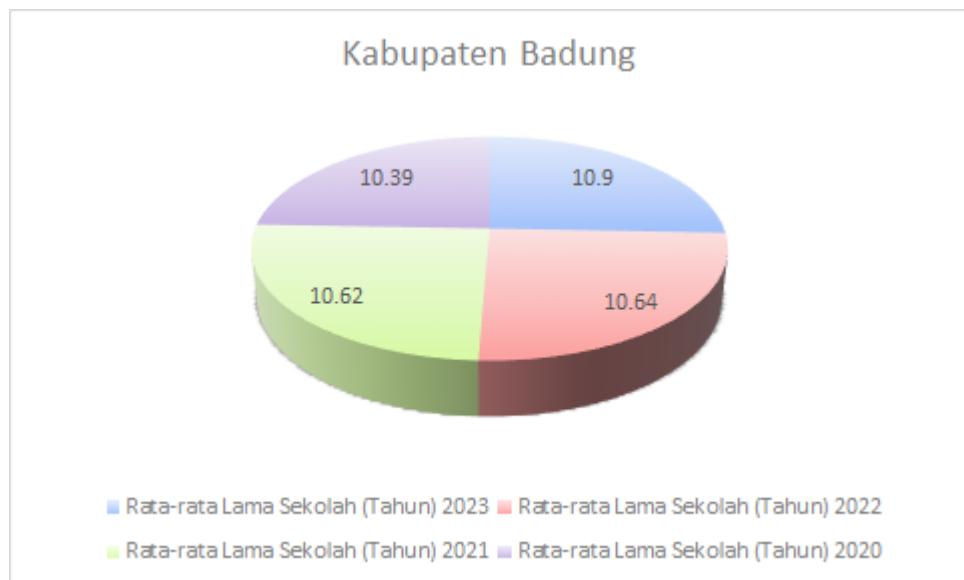
Ketimpangan akses dan partisipasi pendidikan antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Badung memerlukan intervensi yang tepat untuk mengurangi disparitas yang ada. Proyeksi data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung menunjukkan bahwa tingkat pendidikan laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan, terutama di jenjang pendidikan menengah dan tinggi. Untuk menanggulangi hal ini, diperlukan program-program yang dapat merespons akar permasalahan yang telah diidentifikasi, seperti norma sosial, faktor ekonomi, serta akses dan kualitas fasilitas pendidikan (BPS, 2023).

C. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Badung, Bali adalah indikator penting untuk menilai kualitas pendidikan di daerah tersebut. Kabupaten Badung, Bali telah menggunakan berbagai strategi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Salah satu elemen yang dipertimbangkan adalah lama sekolah rata-rata, yang menunjukkan berapa lama siswa membutuhkan untuk menyelesaikan pendidikan formal, berkisar dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas (SMA) atau setara.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Badung, rata-rata lama sekolah selama 2020 sampai dengan 2023 mengalami peningkatan yaitu ;

Gambar 4.3
Rata-Rata Lama Sekolah Siswa Kabupaten Badung



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung, 2024

Tabel 4.4
Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin

Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin (Tahun)				
Kabupaten Badung	Laki - Laki		Perempuan	
	2022	2023	2022	2023
	11.09	11.32	10.07	10.52

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung, 2024

Data ini menunjukkan bahwa siswa di Kabupaten Badung memerlukan waktu yang relatif sama untuk menyelesaikan pendidikan formal, tanpa perbedaan signifikan antara jenis kelamin.

Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi lama sekolah rata-rata di Kabupaten Badung:

- 1) Kemiskinan Penduduk: Akses dan kualitas pendidikan, siswa

yang berasal dari keluarga miskin menghadapi kesulitan dalam menerima pendidikan formal.

2) Beban Ketergantungan Penduduk: seperti tanggung jawab keluarga yang besar

3) Faktor Jarak Tempuh ke Sekolah

Untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah, ada berbagai program yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah, lembaga pendidikan, serta organisasi non-pemerintah. Berikut adalah beberapa program yang bisa disarankan:

1) Program Beasiswa Berkelanjutan

- Deskripsi: Program beasiswa yang mencakup seluruh jenjang pendidikan (dari SD hingga universitas) dan dirancang agar siswa, terutama dari kalangan kurang mampu, bisa terus melanjutkan sekolah hingga tingkat tertinggi.
- Sasaran: Siswa dari keluarga berpenghasilan rendah atau rentan putus sekolah.
- Contoh: Beasiswa pemerintah, swasta, atau internasional seperti *Beasiswa Bidikmisi* (Indonesia), *Bantuan Pendidikan Program Keluarga Harapan (PKH)*.

2) Program Sekolah Gratis dan Inklusif

- Deskripsi: Pendidikan gratis yang tidak hanya mencakup biaya sekolah, tetapi juga mencakup biaya seragam, buku, alat tulis, dan makanan. Ini bertujuan untuk memastikan anak-anak dari semua latar belakang sosial dapat terus bersekolah.
- Sasaran: Anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah atau daerah terpencil.
- Contoh: Program Wajib Belajar 12 Tahun di beberapa negara yang menawarkan pendidikan gratis sampai SMA.

3) Program Penghapusan Perkawinan Usia Dini

- Deskripsi: Kampanye untuk mencegah pernikahan anak melalui edukasi keluarga dan masyarakat, serta regulasi

yang lebih ketat. Ini penting karena perkawinan usia dini sering menyebabkan anak, terutama perempuan, putus sekolah.

- Sasaran: Masyarakat di daerah dengan angka perkawinan dini yang tinggi.
- Contoh: *Girls Not Brides*, sebuah aliansi global yang berupaya mencegah perkawinan anak.

4) Program Pendidikan Alternatif dan Non-formal

- Deskripsi: Program pendidikan non-formal seperti kursus keterampilan, sekolah malam, atau program pendidikan *online* untuk remaja dan dewasa yang putus sekolah agar dapat melanjutkan pendidikan secara fleksibel.
- Sasaran: Anak-anak dan orang dewasa yang sudah putus sekolah namun ingin melanjutkan pendidikan.

5) Program Bimbingan dan Konseling Karier

- Deskripsi: Bimbingan karier sejak usia sekolah menengah untuk membantu siswa memahami pentingnya pendidikan untuk masa depan karier mereka. Ini dapat mendorong siswa untuk tetap melanjutkan pendidikan hingga ke jenjang lebih tinggi.
- Contoh: *Career Development Program*

6) Program Penurunan Angka Putus Sekolah

- Deskripsi: Program yang mendeteksi anak-anak yang berisiko putus sekolah, memberi dukungan konseling, finansial, atau intervensi lainnya untuk memastikan mereka tetap bersekolah.
- Sasaran: Anak-anak di tingkat sekolah dasar hingga menengah.
- Contoh: *Program Bantuan Siswa Miskin (BSM)* yang memberikan bantuan kepada siswa berisiko putus sekolah.

Proyeksi data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Badung menunjukkan bahwa dengan intervensi yang tepat, partisipasi

perempuan dalam pendidikan menengah dan tinggi dapat meningkat sebesar 15-20% dalam lima tahun ke depan. Hal ini akan memberikan dampak positif tidak hanya pada pendidikan, tetapi juga pada pembangunan ekonomi daerah secara keseluruhan (Dinas Pendidikan Kabupaten Badung, 2022). Pendidikan perempuan yang lebih tinggi akan mendorong partisipasi perempuan dalam sektor formal, mengurangi angka kemiskinan, dan memperkuat daya saing sumber daya manusia di Kabupaten Badung.

D. Pengeluaran Perkapita

Pengeluaran per kapita sering kali mencerminkan tingkat kesejahteraan ekonomi individu, yang erat kaitannya dengan kondisi ketenagakerjaan di suatu wilayah. Di Kabupaten Badung, perbedaan pengeluaran per kapita antara laki-laki dan perempuan menunjukkan kesenjangan ekonomi yang dipengaruhi oleh perbedaan akses dan peluang dalam dunia kerja.

Kesenjangan ini tercermin lebih lanjut dalam pengeluaran per kapita, yang merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur tingkat kesejahteraan ekonomi. Apabila data pengeluaran per kapita memperlihatkan bahwa terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan, maka mencerminkan adanya perbedaan akses dan peluang dalam pasar tenaga kerja.

Tabel 4.5

**Data Pengeluaran per Kapita (ribu rupiah) berdasarkan Jenis Kelamin
Kabupaten Badung**

Gender	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Laki-Laki	19.795	19.612	19.601	19.752	20.352
Perempuan	17.350	17.239	17.048	17.127	17.596

Sumber: BPS Kabupaten Badung

Data pengeluaran per kapita menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Pada tahun 2023, pengeluaran per kapita laki-laki tercatat sebesar Rp 20.352, sedangkan perempuan hanya sebesar Rp 17.596. Kesenjangan dalam pengeluaran per kapita ini mencerminkan perbedaan dalam daya beli antara laki-laki dan perempuan. Kondisi ini dapat dihubungkan dengan ketidaksetaraan di pasar tenaga kerja. Misalnya, meskipun perempuan memiliki partisipasi tenaga kerja yang meningkat, pengeluaran mereka tetap lebih rendah dibandingkan laki-laki. Hal ini dapat dikaitkan dengan perbedaan dalam pendapatan kerja dan partisipasi angkatan kerja, yang kemudian berdampak pada daya beli dan standar hidup yang lebih rendah di kalangan perempuan.

Program pemerintah yang dapat membantu mengurangi kesenjangan ini meliputi peningkatan akses perempuan terhadap pekerjaan dengan upah yang layak. Pemerintah dapat menetapkan kebijakan yang mendorong kesetaraan upah bagi pekerja perempuan, terutama di sektor-sektor dengan upah rendah. Seperti yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Banten yang bekerja sama dengan Dirjen. PHI dan Jamsos Kemnaker RI menggelar Bimbingan Teknik (Bimtek) Penyusunan Struktur dan Skala Upah yang bertujuan agar peserta dapat memahami teori dan praktik struktur dan

skala upah yang diharapkan dapat berdampak pada aspek keadilan, kesetaraan upah, kenyamanan bekerja, menciptakan suasana yang kondusif untuk meningkatkan profesionalisme dan produktivitas bagi pekerja. Selain itu, program dukungan untuk UMKM yang dikelola oleh perempuan dapat meningkatkan pendapatan mereka dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Melalui pelatihan dan bantuan modal, pemerintah dapat mendukung perempuan dalam memulai usaha kecil dan menengah yang dapat meningkatkan pendapatan mereka dan mengurangi kesenjangan dalam pengeluaran per kapita. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melaksanakan program pengembangan perluasan kesempatan kerja berupa program bantuan kewirausahaan yang diberikan pada kelompok UMKM di berbagai daerah. Bantuan tersebut diberikan kepada kelompok perempuan agar mereka dapat kembali terberdayakan dan membantu perekonomian keluarga serta masyarakat di daerahnya.

Tabel 4.6

Data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Persen) berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Badung

Gender	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Laki-Laki	80,95	81,25	77,65	80,15	81,42
Perempuan	63,94	63,82	67,21	65,19	66,21

Sumber: BPS Kabupaten Badung

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan mengalami peningkatan dari 63,94% pada tahun 2019 menjadi 66,21% pada tahun 2023. Meskipun ada peningkatan, TPAK perempuan masih tertinggal jauh dibandingkan dengan laki-laki yang mencapai 81,42% pada tahun 2023. Tingginya TPAK laki-laki menunjukkan bahwa mereka lebih dominan dalam angkatan kerja, sementara perempuan masih menghadapi hambatan

untuk berpartisipasi sepenuhnya di pasar tenaga kerja.

Kesenjangan gender dalam ketenagakerjaan di Kabupaten Badung, dapat dihubungkan dengan beberapa faktor sosial, termasuk Proporsi Perempuan Pernah Kawin yang Melahirkan Anak di Usia di Bawah 20 Tahun (MHPK20). Data menunjukkan bahwa meskipun tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan mengalami peningkatan dari 63,94% pada tahun 2019 menjadi 66,21% pada tahun 2023, kesenjangan dengan laki-laki tetap signifikan. Salah satu faktor utama yang memengaruhi keterlibatan perempuan dalam angkatan kerja adalah beban ganda yang mereka hadapi, terutama terkait dengan pernikahan dan tanggung jawab keluarga di usia muda. Tingginya proporsi perempuan yang melahirkan anak pertama sebelum usia 20 tahun (MHPK20 sebesar 10,2% pada tahun 2023) memperlihatkan bahwa banyak perempuan yang harus menghadapi tantangan kehamilan dan pengasuhan di usia produktif awal, yang dapat membatasi partisipasi mereka di pasar kerja dan memengaruhi peluang kerja.

Tabel 4.7

Proporsi Perempuan Pernah Kawin 15-49 tahun yang Melahirkan Anak Lahir Hidup Yang Pertama Kali Berumur Kurang dari 20 tahun (MHPK20) di Kabupaten Badung

Tahun				
2019	2020	2021	2022	2023
0,127	0,112	0,119	0,090	0,102

Sumber: BPS Kabupaten Badung, 2024

Selain itu, perempuan yang terpaksa memasuki peran domestik lebih awal sering kali kehilangan akses ke pendidikan lanjutan dan pelatihan keterampilan, yang pada gilirannya membatasi jenis pekerjaan yang dapat mereka akses. Keterbatasan ini dapat berkontribusi pada jumlah pencari kerja perempuan yang lebih sedikit namun dengan penempatan kerja

yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki, karena perempuan mungkin lebih cenderung melamar pekerjaan di sektor-sektor yang membutuhkan keterampilan rendah atau pekerjaan yang bersifat part-time.

Untuk mengatasi masalah ini, program pemerintah yang sesuai meliputi peningkatan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi perempuan muda. Seperti yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengadakan pelatihan keterampilan, tujuan dilaksanakannya pelatihan ini untuk memberikan keterampilan kepada ibu ibu atau remaja putri, sebagai upaya strategis untuk membekali tenaga kerja dalam penguasaan keterampilan yang dapat digunakan untuk mencari nafkah. Program fasilitas penitipan anak yang terjangkau untuk membantu mereka yang sudah memiliki tanggungan keluarga agar tetap dapat berpartisipasi dalam angkatan kerja. Dengan menyediakan fasilitas penitipan anak yang terjangkau dan berkualitas, perempuan akan lebih mudah untuk tetap bekerja dan meningkatkan partisipasi mereka dalam angkatan kerja formal. Peraturan Menteri PPPA Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyediaan Sarana Kerja yang Responsif Gender dan Peduli Anak di Tempat Kerja. Tempat penitipan anak berkualitas menjadi faktor pendukung dalam optimalisasi produktivitas kerja para perempuan pekerja yang sudah mempunyai anak untuk memenuhi kebutuhan pengasuhan saat mereka bekerja. Selain itu, kampanye kesadaran reproduksi dan program penundaan pernikahan dini juga bisa membantu menurunkan angka MHPK20, memberikan lebih banyak kesempatan bagi perempuan untuk mengembangkan diri sebelum menghadapi beban tanggung jawab keluarga. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) yang bekerja sama dengan Dinas Sosial Kabupaten Kulon Progo mengadakan sosialisasi terkait

pencegahan pernikahan usia dini, memberikan pemahaman bahwa hak-hak anak dan perempuan itu perlu diperjuangkan. Pemerintah juga dapat mendorong perusahaan untuk menyediakan kebijakan fleksibilitas kerja yang lebih baik, sehingga perempuan, terutama mereka yang sudah menikah atau memiliki anak, dapat tetap aktif di pasar tenaga kerja.

Tabel 4.8
Data Pencari Kerja Kabupaten Badung

Komponen	Gender	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar	Laki-Laki	138	372	525	335
	Perempuan	79	79	442	309
Jumlah Pencari Kerja yang di Tempatkan	Laki-Laki	41	234	346	17
	Perempuan	21	133	315	20

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung, 2024

Data ketenagakerjaan menunjukkan dinamika yang menarik. Jumlah pencari kerja yang terdaftar pada tahun 2023 lebih banyak laki-laki dibandingkan perempuan, yaitu 335 orang laki-laki dibandingkan dengan 309 perempuan. Namun, penempatan kerja menunjukkan hasil yang berbeda. Pada tahun 2023, hanya 17 laki-laki yang berhasil ditempatkan, sedangkan perempuan yang ditempatkan berjumlah 20 orang. Ketidakseimbangan ini mengindikasikan tantangan dalam penempatan kerja yang konsisten dan setara, terlepas dari peningkatan pencari kerja di kedua gender.

Kesenjangan gender dalam jumlah pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan ini mencerminkan adanya hambatan struktural yang masih dihadapi oleh pekerja laki-laki dan perempuan di Kabupaten Badung. Meskipun jumlah pencari kerja laki-laki lebih banyak, jumlah mereka yang berhasil ditempatkan justru lebih rendah dibandingkan perempuan.

Salah satu faktor yang mungkin berkontribusi pada ketimpangan ini adalah perbedaan akses terhadap jenis pekerjaan, di mana laki-laki dan perempuan mungkin memiliki preferensi atau kualifikasi yang berbeda. Selain itu, sektor pekerjaan yang tersedia mungkin lebih sesuai dengan keterampilan dan kualifikasi perempuan, seperti di sektor jasa atau administrasi, sementara pekerjaan yang lebih maskulin, seperti konstruksi atau manufaktur, mungkin lebih terbatas atau kurang diminati.

Untuk mengatasi kesenjangan ini, pemerintah dapat mengimplementasikan program pelatihan keterampilan kerja berbasis gender yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan laki-laki dan perempuan di berbagai sektor ekonomi yang sedang berkembang. Seperti yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh mempunyai program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi untuk meningkatkan keterampilan para pencari kerja Selain itu, pembinaan karir dan penghubungan kerja yang lebih intensif melalui platform digital juga bisa membantu mempertemukan pencari kerja dengan peluang kerja yang lebih sesuai dengan keterampilan mereka. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DisnakerTrans) Kabupaten Paser juga memberikan bimbingan jabatan bagi calon tenaga kerja, kegiatan ini bertujuan untuk mempersiapkan diri bagi calon tenaga kerja, karena persaingan kerja yang semakin susah maka di butuhkan pencari kerja lebih mengasah kemampuannya.

Tabel 4.9
Indeks Pemberdayaan Gender dan Komponennya

Komponen IDG	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen	20	20	20	22,5	22,5
Persentase Perempuan Tenaga Manager, Profesional, Administrasi Teknisi	50,16	49,65	51,57	53,77	54,8
Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja	36,52	36,43	36,84	36,87	35,72
IDG	75,23	75,49	76,99	76,33	76,08

Sumber: BPS Kabupaten Badung

Selain itu, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mencerminkan sejauh mana perempuan terlibat dalam pengambilan keputusan dan akses terhadap kesempatan kerja yang layak. IDG juga mencerminkan kesenjangan dalam akses terhadap posisi penting di dunia kerja. Data menunjukkan bahwa persentase perempuan yang terlibat dalam posisi manajerial dan profesional meningkat dari 50,16% pada tahun 2019 menjadi 54,8% pada tahun 2023. Ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pemberdayaan perempuan di sektor formal.

Namun, meskipun keterlibatan perempuan dalam posisi kepemimpinan meningkat, mereka masih menghadapi kesenjangan dalam penghasilan. Kontribusi perempuan terhadap pendapatan kerja justru menurun dari 36,52% pada tahun 2019 menjadi 35,72% pada tahun 2023, menunjukkan bahwa meskipun perempuan lebih terlibat dalam pekerjaan, penghasilan mereka masih lebih rendah dibandingkan laki-laki. Hal ini bisa disebabkan oleh kesenjangan upah gender atau perbedaan dalam jenis pekerjaan yang dijalani oleh laki-laki dan

perempuan.

Di Kabupaten Badung, perempuan masih menghadapi kesulitan dalam mengakses posisi kepemimpinan di bidang politik dan ekonomi. Persentase perempuan yang terlibat dalam jabatan politik atau posisi strategis di sektor ekonomi masih lebih rendah dibandingkan laki-laki. Kesenjangan ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti stereotip gender yang masih kuat, kurangnya akses perempuan terhadap jaringan profesional, serta tanggung jawab ganda antara pekerjaan dan keluarga yang seringkali dihadapi oleh perempuan. Minimnya representasi perempuan di posisi manajerial juga menunjukkan adanya hambatan struktural yang menghalangi perempuan untuk naik ke level kepemimpinan.

Program pemerintah yang dapat membantu mengurangi kesenjangan ini meliputi pelatihan kepemimpinan untuk perempuan, memberikan pelatihan kepemimpinan dan keterampilan manajerial khusus bagi perempuan agar mereka dapat bersaing di sektor pekerjaan yang lebih tinggi dan strategis. Hal yang sama dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Morowali menggelar pelatihan kepemimpinan perempuan, dengan tujuan pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang unggul berkualitas dan berdaya saing. Selain itu program kebijakan keterwakilan perempuan di politik bisa diterapkan, yaitu mendorong keterlibatan perempuan dalam politik dengan menerapkan kuota atau program pendampingan untuk mempersiapkan perempuan mengambil peran lebih besar dalam pengambilan keputusan politik. Melalui intervensi program ini, diharapkan kesenjangan gender dalam tenaga kerja di Kabupaten Badung dapat berkurang, dan perempuan memiliki kesempatan yang lebih adil untuk berkontribusi di sektor ekonomi dan politik. Seperti yang dilakukan oleh Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo mengadakan kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas perempuan khususnya di bidang politik yang diikuti oleh perwakilan dari organisasi-organisasi perempuan di Kulonprogo serta perempuan dari partai politik. Diharapkan dengan pelatihan peningkatan kapasitas perempuan di bidang politik dapat meningkatkan pengetahuan dan keberanian perempuan untuk berperan aktif dalam bidang politik.

Secara keseluruhan, kondisi kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Badung dapat dilihat dari berbagai indikator seperti IPM, pengeluaran per kapita, dan data ketenagakerjaan. Meskipun ada peningkatan dalam beberapa aspek, kesenjangan gender masih nyata, terutama dalam hal pengeluaran per kapita dan kontribusi terhadap pendapatan kerja.

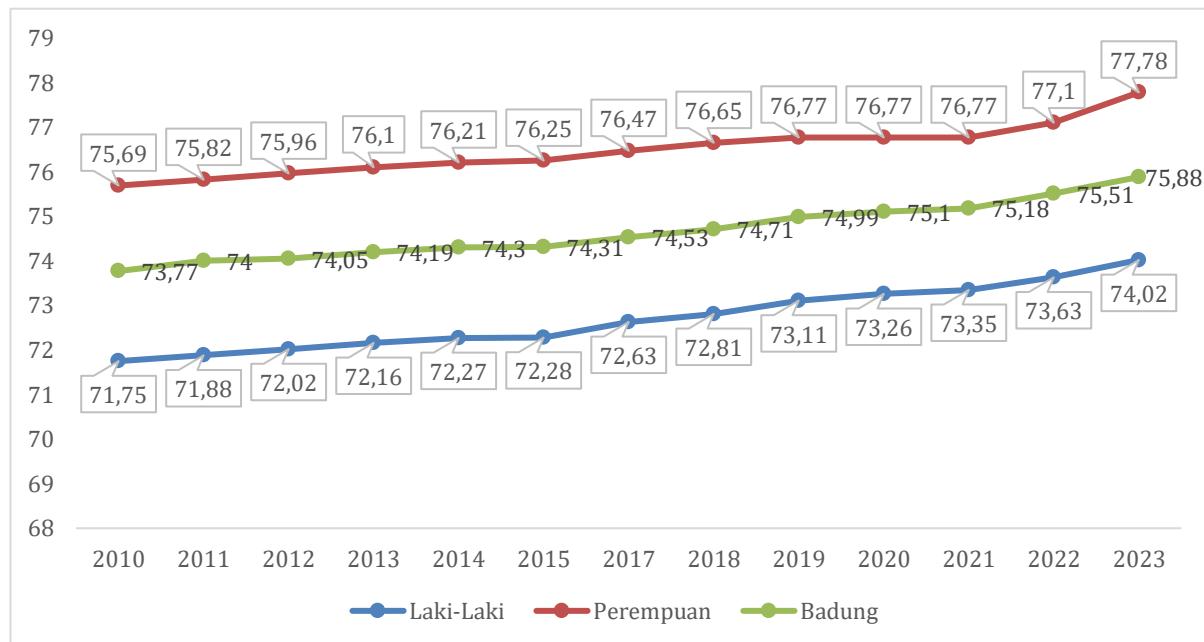
Untuk mengurangi kesenjangan ini, diperlukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, memperkuat akses perempuan terhadap pekerjaan yang layak, dan memastikan kesetaraan dalam upah dan penghasilan. Kebijakan yang mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan serta akses yang adil terhadap sumber daya dan peluang kerja akan sangat berperan dalam mengurangi kesenjangan gender di Kabupaten Badung.

4.3 Indikator komposit dan indikator tunggal yang merepresentasikan pembangunan gender di Kabupaten Badung

4.3.1 Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat (Angka Harapan Hidup)

Gambar 4.4

Grafik Angka Harapan Hidup (AHH) berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Badung Tahun 2010-2023



Sumber: BPS, 2024

Angka Harapan Hidup dari tahun 2016 hingga 2023 cenderung meningkat. Peningkatan AHH mencerminkan perbaikan dalam kualitas hidup, kesehatan, dan akses ke pelayanan kesehatan yang lebih baik di Kabupaten Badung. AHH lebih tinggi pada perempuan dibanding laki-laki, karena perempuan secara biologis memiliki kecenderungan untuk hidup lebih lama. Grafik menunjukkan kesenjangan antara AHH laki-laki dan perempuan. Kesenjangan yang signifikan menjadi indikasi adanya perbedaan akses atau perilaku kesehatan antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, AHH perempuan dan laki-laki meningkat seiring waktu, ini mencerminkan perbaikan keseluruhan dalam kualitas hidup dan layanan kesehatan di Kabupaten Badung. Namun, karena kesenjangan tetap ada, perlu

perhatian lebih terhadap faktor-faktor kesehatan yang memengaruhi salah satu jenis kelamin lebih buruk daripada yang lain.

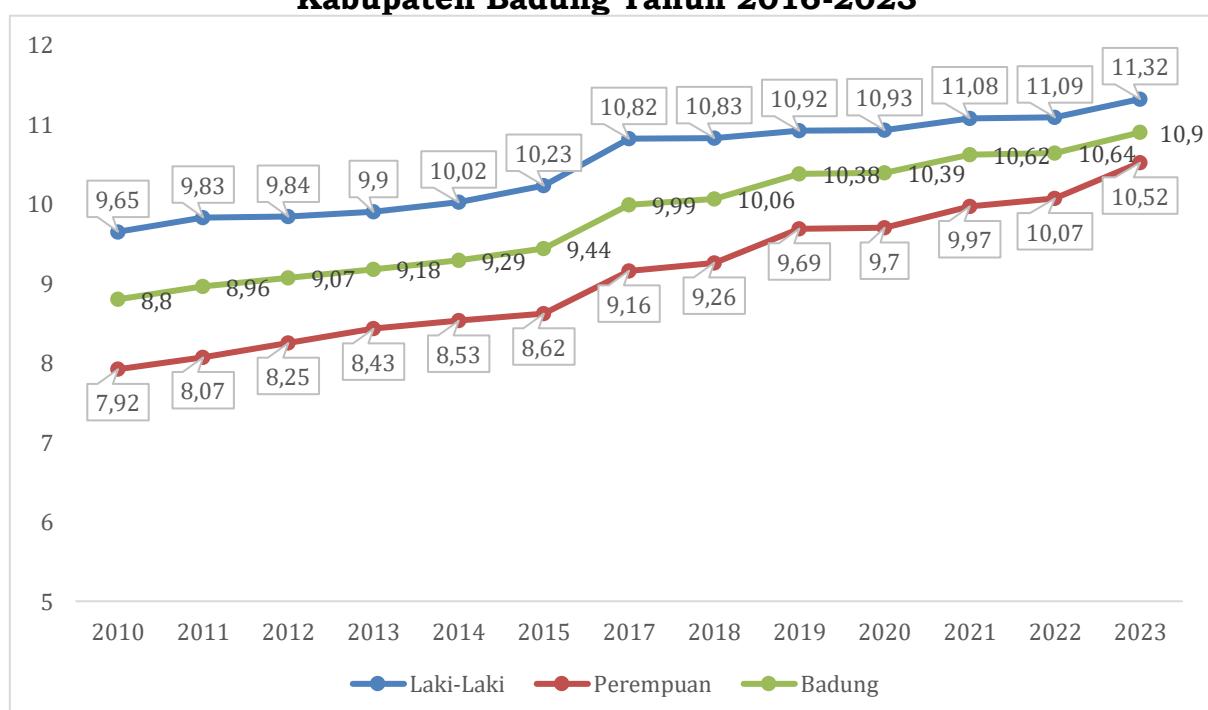
4.3.2 Dimensi Pengetahuan

Dimensi pengetahuan pada Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan salah satu komponen utama yang mencerminkan akses dan pencapaian pendidikan antara laki-laki dan perempuan. Pengetahuan dalam konteks IPG diukur menggunakan dua indikator utama:

a. Rerata Lama Sekolah

Mengukur jumlah tahun rata-rata pendidikan formal yang telah ditempuh oleh penduduk usia 25 tahun ke atas. Indikator ini mencerminkan tingkat pendidikan yang sudah diselesaikan oleh masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. RLS yang tinggi menunjukkan pencapaian pendidikan yang lebih baik dan akses pendidikan yang lebih merata. Berikut adalah data rerata lama sekolah dari tahun 2010-2023.

Gambar 4.5
Grafik Rerata Lama Sekolah (RLS) berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Badung Tahun 2016-2023



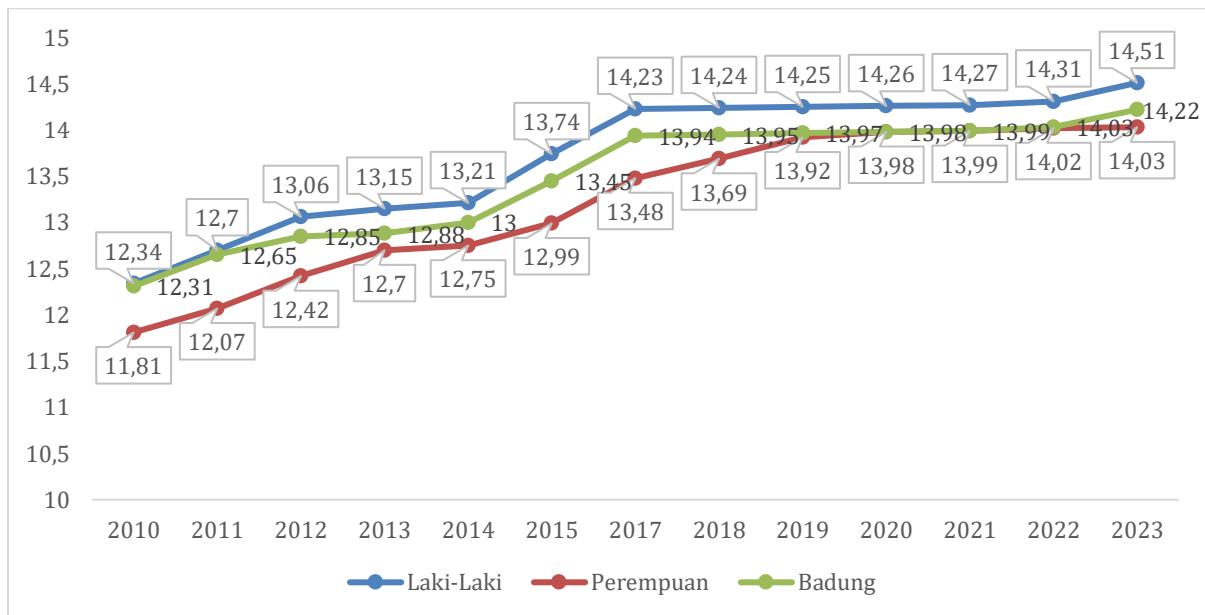
Sumber: BPS, 2024

Grafik RLS tersebut menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun, ini mengindikasikan bahwa rata-rata jumlah tahun pendidikan yang diselesaikan oleh penduduk (baik laki-laki maupun perempuan) semakin lama. Ini mencerminkan peningkatan akses dan keterlibatan masyarakat dalam pendidikan formal di Kabupaten Badung. RLS laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan yang menunjukkan adanya ketimpangan dalam akses atau keberlanjutan pendidikan di antara kedua kelompok. Selain itu, kesenjangan RLS antara laki-laki dan perempuan semakin menyempit selama periode 2016-2023. Ini menunjukkan peningkatan kesetaraan gender dalam pendidikan.

b. Harapan Lama Sekolah

Indikator ini digunakan untuk mengukur perkiraan jumlah tahun pendidikan formal yang diharapkan akan ditempuh oleh anak-anak di usia tertentu, biasanya usia 7 tahun. Harapan lama sekolah menunjukkan akses masa depan terhadap pendidikan, yang penting dalam memastikan kesetaraan kesempatan pendidikan antara laki-laki dan perempuan di masa depan.

Gambar 4.6
Grafik Harapan Lama Sekolah (HLS) berdasarkan Jenis Kelamin
Kabupaten Badung Tahun 2016-2023



Sumber: BPS, 2024

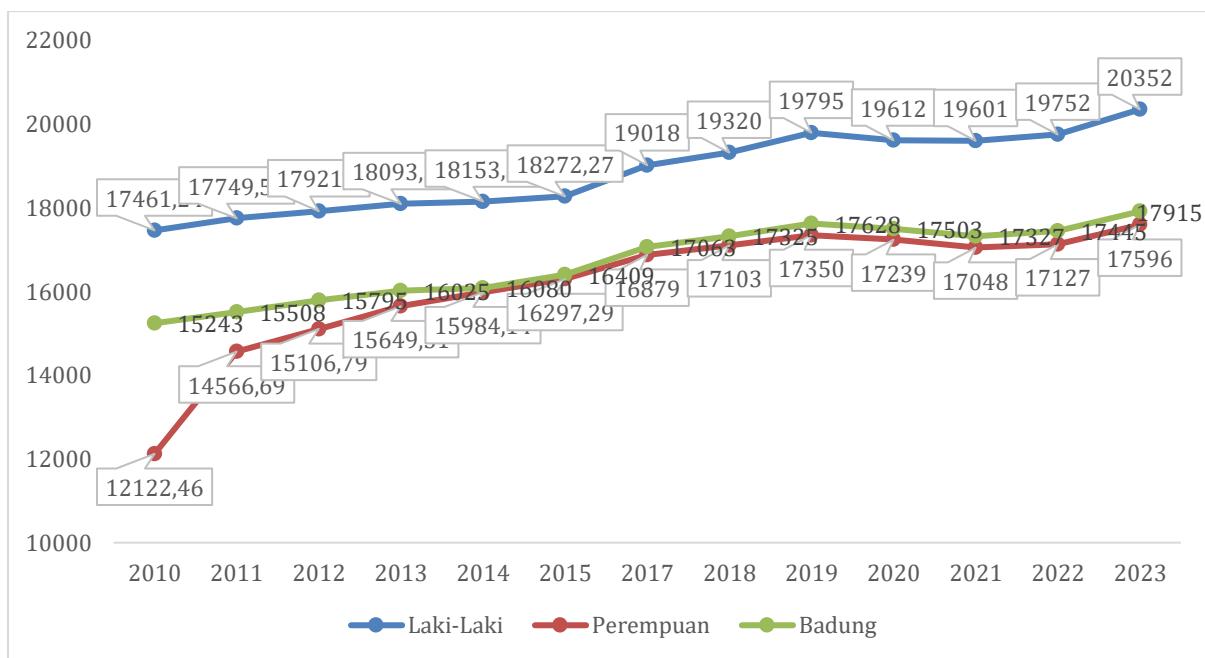
Terdapat peningkatan HLS seiring tahun, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat di Kabupaten Badung, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki harapan untuk bersekolah lebih lama seiring waktu. Nilai HLS laki-laki yang lebih tinggi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan, ini menunjukkan masih adanya tantangan bagi perempuan untuk mendapatkan akses pendidikan yang sama. Nilai HLS pada tahun 2023 menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan yang melebar dibandingkan tahun sebelumnya. HLS perempuan di tahun 2023 tersebut mencerminkan bahwa Kabupaten Badung perlu memperhatikan kesetaraan gender di sektor pendidikan, yang merupakan komponen penting dalam Indeks Pembangunan Gender.

4.3.3 Dimensi Standar Layak Hidup

Dimensi standar hidup layak dalam Indeks Pembangunan Gender (IPG) mengukur aspek kesejahteraan ekonomi yang mencerminkan kesetaraan gender dalam hal akses terhadap sumber daya ekonomi dan kesempatan untuk mencapai standar hidup yang layak. Indikator utama yang digunakan dalam dimensi ini adalah Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan.

Gambar 4.7

Grafik Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (ribu rupiah) berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Badung Tahun 2016-2023



Sumber: BPS, 2024

Pengeluaran per kapita Badung cenderung meningkat dari tahun 2010 hingga 2023. Peningkatan yang konsisten ini mencerminkan peningkatan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat. Jika ditinjau dari pola pengeluaran antara laki-laki dan perempuan, terdapat selisih yang cukup lebar dimana pengeluaran per kapita pada laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Ini bisa mengindikasikan adanya perbedaan akses terhadap sumber daya ekonomi atau kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan. Pola pergerakan

pengeluaran per kapita dari tahun ke tahun tidak menunjukkan perubahan signifikan. Namun, kesenjangan yang bertahan menunjukkan bahwa masih ada ketimpangan dalam distribusi kesejahteraan berdasarkan gender.

4.4 Faktor yang paling berpengaruh signifikan terhadap perubahan Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Badung tahun 2023

Evaluasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi nilai IPG menggunakan pendekatan regresi time series. Variabel yang digunakan sebagai prediktor adalah tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), angka partisipasi sekolah SD, SMP, dan SMA. Hasil analisis menunjukkan bahwa dari keempat variabel independen yang diuji, hanya TPAK yang memiliki pengaruh signifikan terhadap IPG dengan nilai signifikansi untuk TPAK adalah 0,024, yang berada di bawah ambang batas 0,05. Ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang kuat antara TPAK dan IPG.

Secara lebih rinci, koefisien regresi untuk TPAK menunjukkan bahwa setiap peningkatan dalam TPAK akan berdampak pada peningkatan IPG. Misalnya, jika koefisien TPAK adalah 0,5, maka setiap peningkatan 1% dalam TPAK akan meningkatkan IPG sebesar 0,5 unit, dengan asumsi variabel lain tetap konstan.

Sebaliknya, variabel APS SD, APS SMP, dan APS SMA tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap IPG dalam model ini. Hal ini berarti bahwa perubahan dalam tingkat partisipasi sekolah di tingkat SD, SMP, dan SMA tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap IPG berdasarkan data yang dianalisis.

Dari hasil ini, dapat disimpulkan bahwa peningkatan dalam Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berkontribusi positif terhadap pembangunan gender di Kabupaten Badung. Partisipasi angkatan kerja yang lebih tinggi cenderung meningkatkan IPG, menunjukkan bahwa keterlibatan yang lebih besar dalam angkatan kerja dapat membantu memperbaiki kesetaraan gender.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

- 1) Tingkat pencapaian pembangunan manusia berbasis gender yang direpresentasikan oleh Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2023 di Kabupaten Badung diperoleh sebesar 95,94 yang masuk dalam kategori Kesetaraan Gender Menengah Tinggi ($2,5 < |IPG-100| \leq 5$). Selain itu, nilai IPG tersebut berada diatas IPG rata-rata Provinsi Bali.
- 2) Masih terdapat ketidaksetaraan gender yang mencolok dalam beberapa indikator pembangunan manusia, seperti pendidikan, kesehatan, dan partisipasi ekonomi. Meskipun beberapa upaya telah dilakukan untuk meningkatkan peran perempuan dalam berbagai sektor, masih terlihat bahwa laki-laki cenderung memiliki akses yang lebih besar terhadap pendidikan dan peluang kerja yang lebih baik. Hal ini tercermin dari perbedaan indeks pembangunan gender (IPG) yang menunjukkan bahwa kesenjangan antara laki-laki dan perempuan tetap signifikan.
- 3) Indikator komposit dan indikator tunggal yang merepresentasikan pembangunan gender di Kabupaten Badung tahun 2023 pada dimensi AHH perempuan bernilai 77,78 sedangkan AHH laki-laki bernilai 74,02 sedangkan indikator komposit untuk AHH bernilai 75,88. RLS perempuan bernilai 10,52 sedangkan RLS laki-laki bernilai 11,32 sedangkan indikator komposit untuk RLS bernilai 10,9. Pada indikator HLS, perempuan bernilai 14,03 sedangkan laki-laki bernilai 14,51 secara komposit bernilai 14,222. Pengeluaran per kapita pada perempuan sebesar 17596 dan pada laki-laki sebesar 20352, secara komposit perngeluaran perkapita diperoleh sebesar 17915.
- 4) Faktor yang paling berpengaruh signifikan terhadap perubahan Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Badung tahun 2023

adalah tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) dengan nilai signifikansi sebesar 0,024 (<0,05).

5.2 Saran

- 1) Meskipun angka harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS) menunjukkan peningkatan, pemerintah harus tetap fokus pada peningkatan akses pendidikan bagi perempuan. Program beasiswa khusus, akses pendidikan vokasional, dan pelatihan keterampilan bagi perempuan dapat membantu mengurangi kesenjangan pendidikan. Beasiswa dapat diberikan sampai dengan jenjang perguruan tinggi dengan sasaran siswa dari keluarga berpenghasilan rendah atau rentan putus sekolah. Hal ini tentunya diperlukan koordinasi antara Dinas Pendidikan dengan seluruh perangkat desa dan lurah untuk mendata masyarakat yang rentan putus sekolah.
- 2) Perlunya memperkuat Program Garbasari di Kabupaten Badung untuk mendukung tingginya angka harapan hidup Masyarakat di Kabupaten Badung. Program yang dapat dilakukan adalah meningkatkan jumlah dan kualitas SDM yang paham dalam mengimplementasikan pelaksanaan Garbasari. Selain itu juga perlu melakukan pemenuhan sarana, prasarana, dan peningkatan anggaran untuk mendukung pelaksanaan pelayanan Garbasari yang lebih maksimal.
- 3) Tingginya TPAK laki-laki menunjukkan bahwa mereka lebih dominan dalam angkatan kerja, sementara perempuan masih menghadapi hambatan untuk berpartisipasi sepenuhnya di pasar tenaga kerja. Hal ini disebabkan salah satunya dikarenakan tingginya proporsi perempuan yang melahirkan anak pertama sebelum usia 20 tahun (MHPK20 sebesar 10,2% pada tahun 2023) memperlihatkan bahwa banyak perempuan yang harus menghadapi tantangan kehamilan dan pengasuhan di usia produktif awal, yang dapat membatasi partisipasi mereka di pasar kerja dan memengaruhi peluang kerja. Untuk mengatasi masalah ini, program pemerintah yang sesuai meliputi peningkatan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi

perempuan muda, memberikan keterampilan kepada ibu ibu atau remaja putri, sebagai upaya strategis untuk membekali tenaga kerja dalam penguasaan keterampilan yang dapat digunakan untuk mencari nafkah.

- 4) Berdasarkan Peraturan Menteri PPPA Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyediaan Sarana Kerja yang Responsif Gender dan Peduli Anak di Tempat Kerja, Pemerintah Kabupaten Badung dapat merancang Program fasilitas penitipan anak yang terjangkau untuk membantu mereka yang sudah memiliki tanggungan keluarga agar tetap dapat berpartisipasi dalam angkatan kerja. Tempat penitipan anak berkualitas menjadi faktor pendukung dalam optimalisasi produktivitas kerja para perempuan pekerja yang sudah mempunyai anak untuk memenuhi kebutuhan pengasuhan saat mereka bekerja.
- 5) Pemerintah dapat mengimplementasikan program pelatihan keterampilan kerja berbasis gender yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan laki-laki dan perempuan di berbagai sektor ekonomi yang sedang berkembang untuk menghapus perbedaan akses terhadap jenis pekerjaan di mana laki-laki dan perempuan mungkin memiliki preferensi atau kualifikasi yang berbeda. Selain itu, pembinaan karir dan penghubungan kerja yang lebih intensif melalui platform digital juga bisa membantu mempertemukan pencari kerja dengan peluang kerja yang lebih sesuai dengan keterampilan mereka.
- 6) Pemerintah harus memperkuat sistem pemantauan dan evaluasi untuk menilai dampak dari kebijakan-kebijakan terkait gender secara berkala. Selain itu, melibatkan partisipasi masyarakat dalam penilaian dampak kesetaraan gender juga penting agar kebijakan benar-benar efektif dan inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Angligan, I. G. A. I. K., & Suarya, L. M. K. S. (2016). Perbedaan Strategi Koping Pada Perempuan Hindu Bali Yang Bekerja Dan Yang Tidak Bekerja. *Jurnal Psikologi*, 3(3), 125–134. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/psikologi/article/view/28064/17619>
- Aprilandra, S., & Krisnani, H. (2021). Perilaku Diskriminatif Pada Perempuan Akibat Kuatnya Budaya Patriarki Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Konflik. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v3i1.31968>
- Badan Pusat Statistik Bali , 2020. Statistik Bali Tahun 2020. Bali : Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Bali , 2021. Statistik Bali Tahun 2020. Bali : Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung (2023). "Data Pendidikan Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Badung."
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung , 2024. Statistik Bali Tahun 2024. Bali : Badan Pusat Statistik.
- Bhasin, Kamla. (2000). Memahami Gender. Jakarta: TePlok Press
- Beauvoir SD. 1989. *The Second Sex*. New York [US]: Vintage
- Chafetz JS. 2006. *Handbook of the Sociology of Gender*. New York [US]: Springer Science+Business Media, LLC.
- Dinas Pendidikan Kabupaten Badung (2022). "Laporan Tahunan: Partisipasi Pendidikan di Badung."
- Dugger K. 1988. *Social location and gender-role attitudes: a comparison of black and white woman*. *Gender & Society*. Vol. 2 (No. 4): 425-448.
- Fakih M. 1999. Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta [ID]: Pustaka Pelajar Food and Agriculture Organization (FAO). "Gender and Indigenous Peoples' Knowledge." FAO.
- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bali (2020).
- Hartono, D., Tampubolon, E. G., & Irvan, M. (2023). Pengaruh Pembangunan Dan Pemberdayaan Gender Serta Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2020. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 9(4), 373-382
- Hariadinata, I. 2019. *Ketimpangan Gender dan Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Kesehatan, Pendidikan dan Ketenagakerjaan*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- International Labour Organization (ILO). "Gender Equality and Decent Work." ILO.
- International Labour Organization (ILO). (2018). "Global Wage Report 2018/19: What lies behind gender pay gaps." Retrieved from ILO.
- Lulu, Syayidah Fitria dan Aniqurrohmah. 2023. Kesetaraan Gender Dan Nilai Nilai Yang Terkandung Di Dalamnya Menurut Hak Asasi Manusia. *Jurnal Dunia Ilmu Hukum*. Volume 1 ; Nomor 2 ; Desember 2023 ; Page 50-56.

- McKinsey & Company. (2018). The Power of Parity: Advancing Women's Equality in Asia Pacific. McKinsey & Company.
- Mustakimah, L., Huriani, Y., & Zulaeha, E. (2023). Tantangan Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) Tentang Kesetaraan Gender pada Masyarakat Desa. *Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies*, 4(1), 12-29.
- Moser, C. O.N. 1989. Gender Planning in The Third World: Meeting Practical and Strategic Gender Need. *World Development*, 17 (11) Pp. 1799-1825.
- Nassaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), hlm 29.
- Qureshi, A., & Ahmad, S. (2022). Reserved seats for women in Pakistan: Reinforcement of patriarchy and powerlessness (2002–2018). *Women's Studies International Forum*, 94(August 2020), 102629. <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2022.102629>
- Rahmawati, F., & Hidayah, Z. M. U. (2020). Menelusur Relasi Indeks Pembangunan Gender Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *EcceS: Economics Social and Development Studies*, 7(1), 110-129.
- Sari, A. L., Irwandi, I., Rochmansjah, H. R., Nurdiansyah, I., & Aslam, D. F. (2021). UMKM, Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Statistik Indonesia*, 1(1), 22-32.
- Suryani Luh Ketut. (2003). Perempuan Bali Kini. Bali Post.
- Sultana, Farhana.2010. "Gender and Water in a Changing Climate: Challenges and Opportunities." *Water International*, vol. 35, no. 3, pp. 302-319. [DOI:10.1080/02508060.2010.487970](<https://doi.org/10.1080/02508060.2010.487970>).
- Sudirman, F. A., & Susilawaty, F. T. (2022). Kesetaraan Gender Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sdgs): Suatu Reviuw Literatur Sistematis. *Journal Publicuho*, 5(4), 995-1010.
- United Nations. (2020). "The Sustainable Development Goals Report 2020." Retrieved from United Nations.
- United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women). (2021). "Progress of the World's Women 2019-2020: Families in a Changing World." Retrieved from UN Women.
- United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). "Gender Equality and Culture." UNESCO. [<https://en.unesco.org/themes/genderequality>](<https://en.unesco.org/themes/gender-equality>).
- United Nations Development Programme (UNDP) (2021). "Gender Equality in Education and Economic Impact."
- Vina Saviana D. Dan Tutik Sulistyowati, *Sosiologi Gender*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2010).
- World Bank. (2020). Gender for Development: Closing The Gap To Boost Growth.
- World Bank. (2020). Indonesia Country Gender Assessment: Investing in Opportunities for Women.
- Warth, L., & Koparanova, M. (2012, January). Empowering Women for Sustainable Development. UNECE Discussion Papers Series No 2012.1.

World Economic Forum. (2020). "Global Gender Gap Report 2020." Retrieved from World Economic Forum.

Yildiz, E. (2016). The Importance of Women in Sustainable Development. Social Sciences Research Journal, Vol 5, Issue 1, 1-10

LAMPIRAN

2.4.1.1 Penggunaan Personil

Penyusunan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Badung ini menggunakan beberapa tenaga ahli yang terdiri dari disiplin ilmu Ahli Ekonomi Pembangunan sebagai ahli utama dan didukung beberapa disiplin ilmu pendukung yakni, ahli Ilmu Sosial dan Ahli Kebijakan Publik. Adapun kebutuhan keahlian yang akan terlibat disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. Tenaga Ahli

No	Posisi/Jabatan	Kualifikasi/Keahlian	Satuan	Vol
A	Tenaga Ahli Team Leader (berjumlah 1 orang)			
	Ahli Ekonomi Pembangunan	Minimal Pendidikan S3	Org/bln	3
B	Tenaga Ahli Utama (berjumlah 1 orang)			
	Ahli Ilmu Sosial	Minimal Pendidikan S2	Org/bln	3
C	Tenaga Ahli Madya (berjumlah 1 orang)			
	Ahli Statistik	Minimal Pendidikan S2	Org/bln	3
D	Asisten Tenaga Ahli (berjumlah 1 orang)			
	Ahli Kebijakan Publik dan Ekonomi Pembangunan	Minimal Pendidikan S1	Org/bln	3
E	Surveyor (berjumlah 9 orang)			
	Tenenaga Surveyor	Minimal Pendidikan SMA	Org/bln	1

Tabel 3. Personel Pelaksana Kegiatan

No	Nama	Tenaga Ahli	Kualifikasi	Pendidikan
1	Dr. Desak Made Febri Purnama Sari, S.E., M.M.	Team Leader	Ahli Ekonomi Pembangunan	S3
2	Ni Putu Yunita Anggreswari, S.I.Kom., M.Med.Kom.	Tenaga Ahli Utama	Ahli Ilmu Sosial	S2
3	Gde Palguna Reganata, S.Si., M.Si.	Tenaga Ahli Madya	Ahli Kebijakan Publik	S2
4	Dr. Ni Luh Yulyana Dewi, S.I.Kom., M.A.P.	Asisten Tenaga Ahli	Ahli Kebijakan Publik dan Ekonomi Pembangunan	S3

5	I Kadek Arta Wiguna, S.Kom.	Surveyor	-	S1
6	I Kadek Rian Prayana, S.A.P., M.A.P.	Surveyor	-	S2
7	Ni Luh Putu Anggreni, S.A.P.	Surveyor	-	S1
8	Ni Made Melly Genitri, S.Ak.	Surveyor	-	S1
9	Aini Kusumastuti Putranto, S.A.P.	Surveyor	-	S1
10	I Ketut Swidana, S.E.	Surveyor	-	S1
11	Kadek Arvianto Dwi Aditya, S.M.	Surveyor	-	S1
12	Anak Agung Made Diah Parwati, S.A.P.	Surveyor	-	S1
13	Komang Rahayu Indra Parwati, S.M.	Surveyor	-	S1

2.4.1.2 Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

Adapun kegiatan survey Indeks Pembangunan Gender di Kab. Badung sampai dengan hasil tertuang pada tabel berikut:

Tabel 4. Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan Bulan Juni – September 2024

No	URAIAN PEKERJAAN	JUNI			JULI			AGUST			SEPT		
A	Persiapan administrasi dan teknis												
B	Pengumpulan Data												
C	Pelaporan Pendahuluan												
D	Presentasi Laporan Akhir												
E	Penyerahan Dokumen Kajian												

2.4.1.3 Mitigasi Risiko, Monitoring, dan Evaluasi

1) Identifikasi dan Penanganan Risiko

Mitigasi Risiko adalah sebuah upaya untuk mengurangi/menghentikan dampak negative (kerugian) yang sudah terjadi. Adapun hubungan pengelolaan risiko dengan pengendalian internal. Titik temu utamanya adalah pada kepentingan untuk melakukan tindakan pencegahan (preventive action) atau membangun sistem peringatan dini (early warning system or alert system) yang di perusahaan, dimana berbagai resiko yang mungkin terjadi beserta dampaknya dapat di identifikasi, diukur, dan akhirnya dapat diminimalkan sekecil mungkin (controllable risk). Menurut Darmawi (2008) tahapan pertama dalam proses manajemen risiko adalah tahap identifikasi risiko. Identifikasi risiko merupakan suatu proses yang secara sistematis dan terus menerus dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan timbulnya risiko atau kerugian terhadap kekayaan, hutang, dan personil perusahaan. Proses identifikasi risiko ini mungkin adalah proses yang terpenting, karena dari proses inilah, semua risiko yang ada atau yang mungkin terjadi pada suatu proyek, harus diidentifikasi. Dalam pembangunan gender yang menjadi identifikasi resiko adalah;

- a) Stereotip gender (segala sesuatu harus dilakukan atau dimiliki oleh perempuan dan laki-laki).
- b) Subordinasi (sesuatu yang lain kurang penting dari yang lain).
- c) Marjinalisasi.
- d) Beban ganda.
- e) Kekerasan terhadap perempuan.

Dalam konteks mitigasi bencana, faktor resiko dalam hubungannya dengan Indeks Kerukunan Umat beragama di kabupaten Badung yakni tim penyusun harus mengidentifikasi jenis-jenis risiko yang akan mungkin terjadi, faktor risiko yang dihadapi serta tindakan mitigasi bencana yang harus dilakukan

untuk meminimalisir kerugian yang ditimbulkan oleh faktor resiko tersebut. Dalam hal ini untuk kegiatan penyusunan Indeks Pembangunan Gender diperlukan pemetaan wilayah yang akurat, kuesioner yang tepat dan memberikan analisa yang tepat terkait hasil survei yang diperoleh guna memberikan gambaran yang akurat terkait dengan data pembangunan gender di kabupaten Badung.

2) Monitoring dan Evaluasi

Monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas kegiatan yang telah dilakukan, memantau perubahan yang fokus pada proses dan keluaran. Monitoring melibatkan perhitungan atas apa yang kita lakukan, monitoring melibatkan pengamatan atas kualitas dari layanan yang kita berikan. Dalam hal pelaksanaan Penyusunan Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Badung. Kegiatan monitoring dilakukan secara bersama-sama antara pelaksana kegiatan dan kuasa pengguna anggaran untuk:

- d. Menjaga agar kegiatan/ program yang sedang diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran.
- e. Menemukan kesalahan sedini mungkin sehingga mengurangi risiko yang lebih besar.
- f. Melakukan tindakan modifikasi terhadap kebijakan apabila hasil monitoring mengharuskan untuk itu.

Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kegiatan secara sistematis menginvestigasi efektifitas pelaksanaan kegiatan mengacu pada kerangka kerja yang telah disepakati bersama. Menilai kontribusi program terhadap perubahan (Goal/objektif) dan menilai kebutuhan perbaikan, kelanjutan atau perluasan program (rekomendasi). Tujuan Evaluasi yang diinginkan:

- (1) Menentukan tingkat kinerja kegiatan: melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.

- (2) Mengukur tingkat efisiensi pelaksanaan kegiatan: melalui evaluasi dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari perencanaan yang dilakukan.
- (3) Mengukur tingkat keluaran: mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau output dari suatu kebijakan yang dirumuskan.
- (4) Mengukur dampak suatu kebijakan: evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif.
- (5) Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan: untuk mengetahui penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target.
- (6) Sebagai masukan (input) suatu kebijakan yang akan datang: untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik.

3) Pelaporan

Produk yang dihasilkan dari kegiatan ini berupa Buku/Dokumen dengan keluaran dalam bentuk soft copy Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Badung, yang dilaporkan dalam bentuk laporan sebagai berikut:

- (1) Laporan Pendahuluan
- (2) Laporan Akhir
- (3) Dokumen Kajian dalam bentuk dokumentasi perpustakaan hasil penyempurnaan Laporan Akhir.
- (4) Ringkasan Eksekutif.
- (5) Naskah Artikel Jurnal Ilmiah
- (6) *Soft copy* Dokumen Kajian

4) Penutup

Demikian Proposal ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan penyusunan Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Badung

Wakil Rektor Bidang Pengembangan
Akademik, Riset, dan Pengabdian
Kepada Masyarakat
Universitas Pendidikan Nasional

Dr. Ni Wayan Widhiastini, S.Sos., M.Si.
NIP. 19740512005012001